



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI  
DENGAN DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DAN DIRJEN  
PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : I  
Rapat Ke- :  
Jenis Rapat : RDP  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Kamis, 1 September 2022  
Waktu : Pukul 10.15 s.d. 15.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)  
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual *Zoom Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : Roberth Rouw (F-P.NASDEM) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai bulan Agustus 2022  
2. Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA 2023
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:  
46 dari 55 orang Anggota dengan rincian:  
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)  
10 dari 11 orang Anggota  
1. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.  
2. Mochamad Herviano  
3. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.  
4. Sukur H. Nababan, S.T.  
5. Ir. Sudjadi  
6. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.  
7. Sri Rahayu  
8. H. Irmadi Lubis  
9. Ir. Effendi Sianipar  
10. Harvey B. Malaihollo  
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)  
7 dari 8 orang Anggota  
1. Ir. Ridwan Bae  
2. Drs. Hamka B Kady, M.S.  
3. Cen Sui Lan  
4. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.

5. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
6. Ilham Pangestu
7. Muhammad Fauzi, S.E.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA  
(F-GERINDRA)

5 dari 7 orang Anggota

1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
2. Ir. Sumail Abdullah
3. Sudewo, S.T., M.T.
4. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
5. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)

5 dari 6 orang Anggota

1. Roberth Rouw
2. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
3. Drs. H. Soehartono, M.Si.
4. Sri Wahyuni
5. Drs. Fadholi, M. Ikom.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN  
BANGSA (F-PKB)

6 dari 6 orang Anggota

1. H. Ruslan M. Daud
2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
3. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
4. Sofyan Ali, S.H.
5. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
6. H. Syafiuddin, S.Sos.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

5 dari 5 orang Anggota

1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
2. Willem Wandik
3. drh. Jhonni Allen Marbun, M.M.
4. Lasmi Indaryani, S.E.
5. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN  
SEJAHTERA (F-PKS)

3 dari 5 orang Anggota

1. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
2. Ir. H. Sigit Sosiantomo
3. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

4 dari 5 orang Anggota

1. H.A. Bakri H. M., S.E.
2. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
3. H. Boyman Harun, S.H.
4. Mesakh Mirin, SKM.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Plt. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI (Ir. Nur Isnin Istiartono, M.Si.)
2. Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI (Ir. Arif Toha Tjahjagama, DEA)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT / F-P.NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, hari Kamis 1 September 2022, kita mulai jam 10.15 sampai selesai ya. Jadi, saya ingin supaya, karena kita bahas anggaran, waktunya sampai tuntas kita lakukan. Tapi saya ingatkan kita semua, jam 12 kita harus *break* makan ya, kita harus sepakat setiap jam 12 kita *break* makan, mitra juga jangan kalau kita bisa teman yang lain makan kita gantian, tapi mitra juga kita harus hormatin supaya kita makan sama-sama, selesai makan kita lanjut. Kalau ada yang sakit kan nggak ada penanggung jawab, masing-masing. Baik, saya lanjut.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,  
Yang terhormat Saudara Dirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya,  
Serta hadirin yang kami hormati,**

Mengawali rapat hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat wal'afiat secara fisik dan virtual dari tempat kita masing-masing.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi V DPR RI saat ini rapat Komisi V DPR RI telah diikuti oleh, yang hadir 23 orang, fisik 8 orang, dan virtual 15 orang, jumlah fraksi, 6 fraksi, maka rapat ini telah memenuhi kuorum. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Izinkanlah kami membuka Rapat Dengar Pendapat pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI pada hari ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.15 WIB)**

Kami ucapkan terima kasih kepada Dirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perhubungan Laut beserta seluruh jajarannya yang hadir secara fisik dan para Kepala Unit Penyelenggara Bandara Kelas I dan Kelas II kepada Unit Penyelenggara Perhubungan Pelabuhan Kelas I dan Kelas II secara virtual telah memenuhi undangan kami dalam rapat dengar pendapat pada hari ini dengan agenda Membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 sampai bulan Agustus dan alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I mitra kerja Komisi V DPR RI dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023.

**Pimpinan, Anggota Komisi V DPR RI,  
Dan Para Dirjen Kementerian Perhubungan yang kami hormati,**

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 yang lalu. Telah disepakati beberapa hal di antaranya, Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Perhubungan mengenai Alokasi Anggaran Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp33,4 Triliun.

Dari alokasi tersebut anggaran untuk Dirjen Perhubungan Udara sebesar Rp7,17 Triliun, yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan antara lain: Pelayanan transportasi udara, infrastruktur, konektivitas transportasi udara, keselamatan, dan keamanan transportasi udara serta dukungan manajemen. Sementara realisasi anggaran Dirjen Perhubungan Udara dalam APBN Tahun Anggaran 2022 per Agustus 2022 adalah sebesar 54,95%.

Selanjutnya Anggaran Dirjen Perhubungan Laut Rp8,75 Triliun yang akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan antara lain: Keselamatan dan keamanan transportasi laut dibidang navigasi, kesatuan penjaga laut, dan pantai, perkapalan dan kepelautan, serta lalu lintas angkutan laut, infrastruktur konektivitas transportasi laut serta dukungan manajemen. Sementara Realisasi Anggaran Dirjen Perhubungan Laut dalam APBN Tahun Anggaran 2022 per Agustus 2022 adalah sebesar 54,06%.

Sejalan dengan itu, dalam kesempatan ini kami ingin tegaskan kembali agar dalam Proses Penyusunan Anggaran Tahun Anggaran 2023 agar masing-masing unit Eselon I benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan dari Komisi V DPR RI.

Selanjutnya, berdasarkan pengawasan dan yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian dari Dirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perhubungan Laut, antara lain:

1. Mendukung upaya pengendalian harga tiket pesawat, mengoptimalkan pemanfaatan bandara yang telah dibangun oleh Pemerintah serta peningkatan konektivitas udara di daerah 3, T3P.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan dan kenyamanan transportasi udara dan laut.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur konektivitas yang produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
4. Meningkatkan kebijakan pengelolaan, potensi, penerimaan dan pemanfaatan PNBPN di sektor udara dan laut.
5. Program peningkatan SDM sektor transportasi udara dan transportasi laut perlu ditingkatkan.

**Saudara-Saudara yang kami hormati,**

Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Dirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 sampai bulan Agustus dan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi dan Program Anggaran K/L 2023 masing-masing unit Eselon I mitra kerja Komisi V DPR RI dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023.

Demikian pengantar dari kami, dipersilakan untuk menyampaikan penjelasan. Kami persilakan, Pak Saudara Dirjen Perhubungan Udara dulu ya, silakan.

**Pit. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Ir. NUR ISNIN ISTIARTONO, M.Si.):**

**Yang kami hormati Bapak Ketua, Para Wakil Ketua dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*  
Shalom, Om swastiasu,  
Salam sejahtera bagi kita semuanya,

*Alhamdulillah* atas rahmat dan taufik hidayah kami pada hari ini masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat berjumpa hadir pada acara Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Perhubungan Laut.

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022, serta Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2023 Dirjen Perhubungan Udara. Kami laporkan bahwa bersama kami hadir pula para Direktur di belakang dan juga para Kepala Kantor Otoritas Perhubungan Udara maupun Kepala Kantor BPU Kelas I yang hadir secara virtual.

Adapun pokok-pokok materi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah sesuai agenda, evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Agustus. Kemudian, Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi dan Program unit Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023.

**Bapak Ketua, Para Wakil Ketua dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang sangat kami hormati,**

Pertama kali, izinkan kami menyampaikan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus. Berdasarkan kronologis anggaran Dirjen Perhubungan Udara Tahun 2022. Dari Pagu Indikatif Rp7,03 Triliun di mana dalam perjalanannya mengalami penambahan dan penurunan baik akibat daripada

**KETUA RAPAT:**

Pak Dirjen sebentar, teman-teman mau hadirkan Kepala-Kepala Balainya nggak? Kalau mau, ada yang belum kenal soalnya Kepala Balainya kali. Iya, Pak Dirjen bisa nggak?

**Plt. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Ir. NUR ISNIN ISTIARTONO, M.Si.):**

Oh siap.

**KETUA RAPAT:**

Kita biar kita kenal liat muka-mukanya itu di mana itu.

**Plt. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Ir. NUR ISNIN ISTIARTONO, M.Si.):**

Siap Bapak.

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**Plt. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Ir. NUR ISNIN ISTIARTONO, M.Si.):**

Jadi, Direktur.

**KETUA RAPAT:**

Kita mulai dari Aceh, dah.

**Plt. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Ir. NUR ISNIN ISTIARTONO, M.Si.):**

Siap Bapak, dari yang hadir fisik dulu Pak, ya, dari Direktur Angkutan Udara urut Bapak, Pak Putu. Kemudian dari Kepala Balai Kalibrasi, sebelumnya Pak Rizal. Kemudian kebetulan Pak Dir Hubut per tanggal 1 ini pensiun Bapak, tinggal diwakili oleh Pak Agustinus, di pesawat. Kemudian di belakang di baju putih, mohon berdiri mungkin ada Pak Direktur Bandar Udara Bapak, Pak Nafan.

**KETUA RAPAT:**

Kalau bisa perkenalkan buka masker biar kita kenal, Pak.

**Plt. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Ir. NUR ISNIN ISTIARTONO, M.Si.):**

Kemudian ada Direktur Keamanan yang di sana Pak, Pak Budi. Kemudian yang hadir secara virtual dari Kaotban I sampai Kaotban X Bapak, satu-satu Bapak. Dari Kaotban I, Pak Gandos.

**KETUA RAPAT:**

Satu itu mana saja Pak, biar kami tahu.

**Plt. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Ir. NUR ISNIN ISTIARTONO, M.Si.):**

Satu itu wilayahnya adalah mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung Bapak, kemudian Kaotban Pak Gandos, Kapten Gandos. Kemudian Kaotban II itu di Medan itu mulai Aceh, kemudian Sumatera Utara, kemudian Riau Kepulauan dan Riau, Bapak, II Kaotban II, Pak Agus Priatno.

Kemudian Kaotban III di Surabaya, Kaotban II, Pak Agus, Kaotban II, mungkin masih, terus-terus Pak terus oke, oke. Kaotban III, Pak Kapten Bowi di Surabaya, itu wilayahnya Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, kemudian sampai ke Kalimantan Selatan Bapak, pak.

**F – P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):**

Mana Pak?

**Plt. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Ir. NUR ISNIN ISTIARTONO, M.Si.):**

Kapten Bowi.

**F – P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):**

Gambar-gambarnya, Pak?

**Plt. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Ir. NUR ISNIN ISTIARTONO, M.Si.):**

Pak Kapten Bowi, Pak Kapten Bowi, mungkin *trouble anu*. Ya namanya Mauluddin, bukan Bowi, Pak Mauluddin tapi panggilannya Kapten Bowi, mohon maaf, Pak Mauluddin, nah ini Pak. Gitu.

**F – P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):**

Oh iya nanti saya foto.

**Plt. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Ir. NUR ISNIN ISTIARTONO, M.Si.):**

Kemudian Kaotban IV, Pak Sigit.

**F – P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):**

Pak Ketua, yang penting dia lihat saya nggak?

**Plt. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Ir. NUR ISNIN ISTIARTONO, M.Si.):**

*Insy Allah* liat Bu. Pak Kaotban IV di Bali Bapak, Pak Sigit itu membawahi Bali, NTB dan NTT. Pak Sigit bisa tampil untuk ditampilkan, Pak Sigit, Sigit Widodo, IV, kami lanjut Bapak. Kemudian Kaotban V ada di Makassar Bapak-Ibu, jadi Makassar itu daerah sampai termasuk Palu, Kendari, Sulsel, Mamuju juga di Kalbar, nah ini Pak Agus Tono, Pak Agus Tono, termasuk yang Bone Bapak, yang kemarin mau penerbangan *cancel*, ditunda.

Kemudian, masuk Kaotban VI di Padang Sumatera Barat. *Nah*, ini Bu Endah, itu tadi Bu Endah, tadi ada di itu. Kemudian wilayahnya sampai Bangka Belitung Bapak, termasuk Palembang Sumsel, Jambi juga Bapak, Jambi masuk di Bu Endah di Kaotban VI. Kemudian, Kaotban VII ada di Balikpapan Bapak, Kaotban VII Pak Anung, Pak Anung, sering ketemu kali karena di Balikpapan mungkin, *njeh*. Itu yang sekarang dekat dengan IKN kantornya, itu membawahi hingga Kaltara sampai Kalteng Bapak. Mohon maaf tadi yang Kaotban I sampai Kalbar, kalau Kalbar masuk Otban I tapi yang lainnya Kalimantan masuk di Otban VII, Pak Anung selain Kalsel tadi Otban III.



Kemudian Otban VIII, posisi ada di Manado Bapak, Pak Affandi Rusli ini hingga daerah Miangas Bapak, itu sampai Maluku dan Maluku Utara. Ada di dan Gorontalo ada di Otban VIII Pak Affandi, ini ada Pak Affandi. Kemudian, Kaotban IX posisi ada di Manokwari, Manokwari mayoritas Pak Sigit posisi di Manokwari, itu posisinya untuk wilayah Papua Barat *plus* kawasan Nabire. Jadi, walaupun Nabire ada di Papua tapi masuk di Kaotban IX. Sedangkan, yang lain yang di Papua saat ini, itu ada di Kaotban X yaitu Pak Asep, yang Asep Kosasih, itu Pak Sigit tadi tuh sebelumnya itu kumpul Pak, Pak Asep X di Merauke, itu Bapak.

Merauke, oh, sekarang ini ada, waduh, ada Rakornis Bapak. Merauke, Merauke Pak. Nanti kemungkinan ada perubahan wilayah, kami akan coba evaluasi dengan Menpan untuk penyesuaian masalah kewilayahan Bapak (suara kurang jelas). Karena lebih kawasannya jangkauannya lebih ke Merauke waktu itu, kami akan evaluasi saat nanti ada pemekaran itu Bapak. Itu demikian Bapak, apakah perlu ditambah yang lain Bapak? Oke, makasih Bapak. Jadi untuk anggaran, kami lanjutkan.

**Mohon izin Bapak Ketua, Para Wakil Ketua dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Dari Pagu Anggaran awal Rp7,03 Triliun dengan adanya berbagai dinamika, maka Pagu Anggaran Dirjen Perhubungan Udara akhirnya sampai dengan saat ini menjadi Rp7,645 Triliun. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBN sampai dengan bulan Agustus sudah terserap Rp4 Triliun atau 54,95%. Dan, apabila dibandingkan dengan kurva s, lanjut, terus *slide*. Apabila dibandingkan dengan kurva S, prosentase penyerapan realisasi Dirjen Perhubungan Udara sampai bulan Agustus ini sudah melebihi target yang ditetapkan di awal yaitu 50,21. Sehingga mudah-mudahan bulan September juga ada peningkatan.

Untuk sumber dana APBN, lanjut. Dapat disampaikan bahwa realisasi PNBPN Dirjen Perhubungan Udara sampai dengan bulan Agustus akhir Agustus sebesar Rp983 Miliar atau telah mencapai 74,06% dari target yaitu Rp1,32 Triliun. Diharapkan beberapa bulan ke depan prosentase realisasi akan terus mengalami kenaikan sejalan dengan semakin baiknya dunia penerbangan karena peningkatan perekonomian nasional. Namun demikian kami memprognosakan, memetakan, maksud penyerapan kami hanya 91,% karena kami juga memberikan Rp0 yang telah, untuk peningkatan industri penerbangan sampai dengan Desember untuk PJP4U yaitu pendaratan dan parkir pesawat.

**Bapak Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Dalam upaya mendukung pelaksanaan padat karya, Dirjen Perhubungan Udara telah dan akan mengimplementasikan kegiatan padat karya di 147 desa di 29 Provinsi. Berdasarkan data realisasi per 31 Agustus dapat kami laporkan bahwa telah terealisasi biaya upah sebesar Rp6,67 Miliar dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 4.120 orang atau tercapai 61,02% dari

target total yang direncanakan. Kegiatan padat karya ini diimplementasikan dalam rangka membantu masyarakat sekitar bandara dengan memanfaatkan dana pemeliharaan bandar udara melalui kegiatan sederhana yang tidak memerlukan keterampilan khusus seperti pemotongan rumput, pembersihan saluran, pagar, bandara, pengecatan marka dan sebagainya.

Dalam kesempatan ini kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang kami hormati, yang selama ini telah berkesempatan berpartisipasi langsung untuk bersama-sama kami terjun ke lapangan guna mendukung pelaksanaan program padat karya. Ke depan tentu kami akan terus mendorong para KPA, PPK agar lebih aktif berkomunikasi serta dalam rangka mengundang Bapak-Ibu pada kegiatan padat karya di sisa waktu Tahun 2022 ini.

**Bapak Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan poin bahasan terkait dengan Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran Dirjen Perhubungan Udara dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa rencana Pemerintah atau RKP Tahun 2023 mengusung tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dan, Kementerian Perhubungan khususnya Dirjen Perhubungan Udara terfokus pada prioritas nasional kelima atau PN5 yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Guna mencapai sasaran prioritas nasional RPJMN 2020 sampai dengan 2024 dalam kaitannya dengan konektivitas udara khususnya perkuatan infrastruktur untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Dirjen Perhubungan Udara berupaya untuk memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang dilakukan pada Tahun 2022 ini yaitu terhadap pemenuhan cakupan layanan angkutan udara perintis baik penumpang maupun kargo. Kemudian program jembatan udara yang terintegrasi dengan tol laut sebanyak 43 rute.

Selain itu, dapat kami laporkan pula bahwa untuk sasaran pelayanan sektor transportasi udara Tahun 2023 adalah mencapai *on time performance* sebesar 89% dan dengan target bandara baru yang terbangun sebanyak 13 lokasi.

**Bapak Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Dalam rangka mendukung program Pemerintah serta untuk meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. Dirjen Perhubungan Udara telah menyusun program-program sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah RPJMN dan

*outlook* rencana strategis atau Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020 sampai 2024.

Terdapat 5 prioritas proyek prioritas usulan Dirjen Perhubungan Udara yang termasuk dalam 4 prioritas nasional RPJMN yaitu:

1. Jembatan udara merupakan *major project* dengan target 43 rute di Papua dan Papua Barat;
2. Pembangunan bandar udara baru dengan target di Tahun 2023 sebanyak 16 bandara merujuk kepada kerangka pendanaan dalam Renstra DJU namun terkoreksi menjadi sebanyak 11 lokasi dikarenakan adalah alokasi pendanaan yang terbatas;
3. Pengembangan bandara di daerah terisolir, perbatasan, dan rawan bencana pada 28 bandar udara;
4. Peningkatan kapasitas bandara baik melalui rehabilitasi maupun penggamangan di 156 bandara, ini di luar bandara baru dan bandara di 3T;
5. Memulai pembangunan bandara perairan atau *waterbase airport* untuk mendukung destinasi wisata perairan.

**Bapak Ketua, Para Wakil Ketua dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Selanjutnya, perkenankan kami pula kami menyampaikan kronologis Tahun Anggaran 2023. Merujuk pada hasil pembahasan bersama satker, Pemda dan Kementerian Perhubungan. Pagu Kebutuhan Dirjen Perhubungan Udara Tahun 2023 adalah sebesar Rp19,9 Triliun. Di mana Alokasi Pagu Definitif Indikatif Dirjen Perhubungan Udara adalah sebesar 7,001. Merujuk pada surat bersama Menteri PPN Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan. Pagu Anggaran Dirjen Perhubungan Udara Tahun 2023 menjadi sebesar Rp7,178 Triliun. Di mana terdapat tambahan alokasi sebesar Rp176 Miliar untuk memenuhi keselamatan penerbangan dan dukungan IKN.

Pagu sebesar 7,178 dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja pegawai sebesar Rp812 Miliar;
- Kemudian belanja barang operasional sebesar Rp863 Miliar;
- Kemudian PNBPN sebesar Rp624 Miliar;
- BLU sebesar Rp293 Miliar;
- SBSN sebesar Rp2,3 Triliun;
- Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp85 Miliar, dan
- Belanja barang non-operasional dan belanja modal sebesar Rp2,15 Triliun, lanjut.

Penambahan Pagu Dirjen Perhubungan Udara Tahun 2023 sebesar Rp176 Miliar dari Pagu Indikatif Rp7,001 Triliun menjadi pagu 7,178 merupakan

pemenuhan terhadap usulan kegiatan prioritas yang dibahas bersama Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan, yang meliputi adalah:

1. Untuk pelaksanaan kegiatan keamanan dan keselamatan penerbangan guna memenuhi kegiatan pengawasan di 10 Kantor Otoritas.
2. Memenuhi standar keselamatan penerbangan melalui pengadaan kendaraan PK-PPK di 7 lokasi.
3. Kegiatan pada bandar udara APT Pranoto sebagai pemenuhan terhadap dukungan program IKN.

Berikut kami sampaikan alokasi Anggaran Dirjen Perhubungan Udara rentang waktu 2020 hingga 2023 terhadap target RPJMN dan Renstra di mana terdapat selisih total pagu yang cukup signifikan yaitu *gap* sebesar Rp36 Triliun yang tentunya akan menjadi bahasan penyesuaian target hingga Tahun 2024.

**Bapak Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Sekilas izinkanlah pula kami menyampaikan *outlook* Pagu Anggaran Dirjen Perhubungan Tahun 2023. Fokus dan sasaran program Dirjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian kontrak tahun jamak dan tunggakan pekerjaan;
2. Pelayanan masyarakat dalam program jembatan udara melalui keperintisan;
3. Program peningkatan keselamatan dan keamanan penerbangan;
4. Program padat karya, dan yang terakhir;
5. Dukungan konektivitas dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dalam program nasional.

Secara detail, *outlook* Pagu Indikatif Tahun 2023 Dirjen Perhubungan Udara dapat dilihat pada *slide* 13 di depan kita.

**Bapak Ketua, Para Wakil Ketua dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Berikut kami sampaikan Rencana Kegiatan Prioritas di Tahun 2023 Dirjen Perhubungan Udara:

1. Untuk subsidi perintis dialokasikan anggaran untuk 21 Korwil dengan 228 rute perintis penumpang, 41 rute perintis kargo, dan 1 rute perintis udara - kargo udara, sebagaimana di *slide*;
2. Adalah sebaran kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mendukung program Pemerintah antara lain membangun bandara baru, pembangunan pengembangan bandara penunjang KSPN, KEK, dan kawasan industri, sebagaimana di *slide*, lanjut, selanjutnya pula;
3. Daftar kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada beberapa bandara 3T perbatasan dan rawan bencana, *next slide*.

Berdasarkan data RPJMN dan Renstra Tahun 2020 sampai dengan 2024 serta data proyek strategis nasional pada Dirjen Perhubungan Udara.

Direncanakan terdapat 19 lokasi yang akan menjadi prioritas untuk diresmikan oleh Bapak Presiden di tahun sampai dengan sebelum Tahun 2024 yaitu:

- 10 bandar udara baru adalah Siaw, Tambelan, Siaw Sitaro, Tambelan, Nabire Baru, Siboru Fakfak, Mentawai di Sumatera Barat, Mandailing Natal-Sumut, Bouwatu, Boalang Mangondouw, Banggai Laut, dan Singkawang.
- Sedangkan terdapat 9 bandar udara yang sudah ada namun dibangun terminal yang baru yang akan diresmikan, targetnya adalah Ende, kemudian Waingapu, Timika, Ewer, Karimun Jawa, Dewandaru, Tampa Padang, Malinau, Toli-Toli serta Mulia di Papua, lanjut.

Sebagaimana, arahan Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Bahwa tujuan dari kegiatan pendukung Padat Karya Tahun 2023 adalah mengurangi beban terdampak Covid-19 karena berkurangnya daya beli dan merupakan salah satu dari program pemulihan ekonomi nasional. Untuk rencana kegiatan Padat Karya Tahun 2023, Dirjen Perhubungan Udara tetap menargetkan kegiatan pada 147 Desa/Kabupaten di 29 Provinsi dengan target penyerapan sebanyak 6.195 tenaga kerja dan dana Rp15,18 Miliar.

**Bapak Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang sangat kami hormati,**

Selanjutnya, dalam *slide* berikut kami sampaikan kegiatan prioritas yang merupakan usulan kegiatan Direktif Presiden, rapat kerja maupun RDP serta hasil kunjungan kerja yang tertampung pada alokasi Pagu Anggaran Dirjen Perhubungan Udara, sebagaimana dalam *slide*.

Kami juga mohon berkenan Bapak-Ibu sekalian, beberapa masukan dan usulan masih memerlukan kesiapan dalam pemenuhan *readiness* kriteria serta proses koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Misalnya dalam proses penyelesaian masalah penyediaan lahan, penyediaan (suara kurang jelas) *study* tadi, Amdal dan detail desain, beberapa hal perlu kita siapkan dulu sebelum kita masuk kepada konstruksi. Dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara akan berupaya untuk segera menindaklanjuti proses kesiapan dimaksud agar persyaratan dapat segera terpenuhi. Sehingga dalam kurun waktu yang terdekat ke depan sudah dapat dicapai persyaratan pelaksanaannya. Beberapa yang ada daftar ada di *slide* yang kamiayangkan.

**Bapak Ketua, Para Wakil Ketua dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang sangat kami hormati,**

Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan pada kesempatan hari ini. Besar harapan kami masukan serta dukungan Bapak Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati demi tercapainya pelayanan jasa dan transportasi udara yang aman, selamat, nyaman kepada seluruh masyarakat pengguna jasa transportasi udara.

Demikian kami laporkan, terima kasih atas perhatiannya.

*Wabillahitaufiq walhidayah,  
Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,  
Shalom,  
Om Shanti Shanti Om,  
Salam sehat selalu.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, kita lanjut ya. Dirjen Perhubungan Laut, silakan Pak.

**DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Ir. ARIF TOHA TJAHHAGAMA, DEA):**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**Yang terhormat Para Pimpinan Komisi V DPR RI,  
Yang terhormat Bapak-Ibu Anggota Komisi V DPR RI,  
Yang saya hormati Bapak Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Udara  
beserta jajaran,  
Para hadirin sekalian yang kami muliakan,**

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,  
Selamat siang salam sejahtera, salam sehat selalu bagi kita semua.*

Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang dengan berkat limpahan rahmat dan karunia nikmat-Nya, kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Sehingga dapat bertemu kembali dalam rapat dengar pendapat berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 dan Rencana Alokasi Anggaran menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2023.

Izinkan, kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi V DPR RI yang selalu mendukung Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku mitra kerja dan perwakilan dari Pemerintah untuk terus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia selaku pengguna jasa transportasi laut.

Turut hadir bersama kami saat ini adalah para Direktur dan Kepala Bagian serta para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Distrik Navigasi, KSOP, serta Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I dan Kelas II yang hadir secara virtual. Kami perkenalkan untuk para Direktur dan Sekretaris Direktorat Jenderal, Pak Plt. Sekretariat Jenderal Perhubungan Laut dengan Bapak Subagyo, sekaligus sebagai Direktur Kepelabuhanan, Pak. Yang selanjutnya adalah Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kapten Hendri Ginting. Yang selanjutnya adalah Bapak Direktur Perkapalan dan Kepelautan Bapak Ahmad Wahid.

**KETUA RAPAT:**

Pak, Pak Dirjen, kalau yang kirim barang-barang itu kemarin saya minta bantuannya ke Pak Dirjen siapa yang bantuin ya?

**DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Ir. ARIF TOHA TJAHAJAGAMA, DEA):**

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Pak Kapten ini ya?

**DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Ir. ARIF TOHA TJAHAJAGAMA, DEA):**

Hendri Ginting.

**KETUA RAPAT:**

Makasih Pak, kemarin saya dibantu, makasih.

**DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Ir. ARIF TOHA TJAHAJAGAMA, DEA.):**

Selanjutnya Direktur Kenavigasian Bapak Hengki Angkasawan. Selanjutnya Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kapten Mugen Satoto. Selanjutnya, para KUPT yang hadir secara virtual kami sebutkan sebagian karena cukup banyak Bapak.

Yang pertama adalah Syahbandar Utama Tanjung Priok, Bapak Andi Hartono, bisa ditampilkan, Pak Andi Hartono adalah Syahbandar Utama Tanjung Priok. Selanjutnya adalah Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Kapten Wisnu Handoko, jadi di setiap pelabuhan utama kita ada dua unit kerja, tiga unit kerja Pak, jadi ada Syahbandar Utama, ada Otoritas Pelabuhan Utama dan Distrik Navigasi. Selanjutnya adalah Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok, Bapak Remon.

Selanjutnya adalah Kantor, Kepala Kantor Syahbandar Utama Belawan, ini Plt., Pak. Kapten Barto. Kemudian Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Pak Andi Fiardi, ya. Selanjutnya Kepala Distrik Navigasi Kelas I Belawan, Pak Arif. Selanjutnya adalah Kepala Syahbandar Utama Tanjung Perak, Pak Hernadi. Kemudian Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Pak Jefri, di sampingnya. Kemudian selanjutnya Kepala Distrik Navigasi Surabaya, Pak M. Tohir. Selanjutnya Kepala Syahbandar Utama Makassar Bapak Kapten Barlet. Selanjutnya Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Bapak Anto. Selanjutnya Kepala Distrik Navigasi Makassar, ya rupanya ini dalam perjalanan Pak jadi beliau absen virtual. Kemudian selanjutnya Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang ini dijabat oleh

Pelaksana Tugas yaitu Pak Trianto. Kemudian, Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Kapten Hermanta. Kemudian Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai, Pak Viktor.

Selanjutnya, KSOP Kelas I Sorong Ibu Jeje, Pak ya. Selanjutnya Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun, Bapak John Kennedy, ya. Jadi itu Pak, sebagian beberapa Kelas Utama dan Kelas I yang hadir disamping juga ada Kelas I dan Kelas II lainnya, Pak.

### **Para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,**

Pada kesempatan hari ini terdapat dua fokus agenda pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan Rencana Alokasi Anggaran menurut Fungsi, Program dan Prioritas Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2023.

Pertama-tama perlu kami sampaikan sebelumnya berkaitan dengan realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp9,14 Triliun atau 96% dari pagu sebesar Rp9,49 Triliun dengan penerimaan PNBPN yang melampaui target yaitu sebesar Rp4,17 Triliun atau 109% dari target sebesar Rp3,84 Triliun.

Beranjak ke Tahun Anggaran 2022 terdapat perubahan Pagu yang semula sebesar Rp8,98 Triliun menjadi sebesar Rp9,27 Triliun yang bersumber dari lunturn SBSN, lunturn PHLN Teluk Palu dan penambahan Pagu PNBPN di mana realisasi sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp4,73 Triliun atau 54,06%. Dengan rincian realisasi:

- Belanja pegawai sebesar 60,22%
- Belanja barang sebesar 52,03%
- Belanja modal sebesar 44,58%.

Dengan asumsi Pagu Dirjen Perhubungan Laut sebesar Rp8,76 Triliun yang merupakan alokasi di luar Pagu *automatic adjustment*. Adapun target penyerapan Dirjen Perhubungan Laut sampai dengan akhir bulan Desember 2022 adalah sebesar 96,30%. Kemudian, berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan, alokasi blokir *automatic adjustment* pada Dirjen Perhubungan Laut sebesar Rp513 Miliar meliputi blokir *automatic adjustment* eksisting sebesar Rp256 Miliar dan penambahan blokir *automatic adjustment* sebesar Rp257 Miliar.

Terkait dengan realisasi penerimaan PNBPN sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 telah mencapai Rp3 Triliun atau 83,04%. Hal tersebut sudah melampaui pencapaian PNBPN pada bulan yang sama di Tahun 2021 sebesar Rp2,73 Triliun atau 71,91%. Sehingga dengan pencapaian tersebut kami menargetkan sampai dengan bulan Desember 2022 penerimaan PNBPN dapat mencapai target sebesar 112,48%. Artinya melebihi target yang telah ditetapkan Tahun 2022 dan melebihi dari penerimaan PNBPN Tahun 2021 sebesar 109,64%.



Berkaitan dengan Kegiatan Padat Karya Tahun Anggaran 2022. Sampai dengan posisi saat ini telah terealisasi penyerapan tenaga kerja sebanyak 4.277 orang dengan total upah yang telah dibayarkan sebesar Rp3,18 Miliar dari kegiatan pendukung padat karya yang telah dilaksanakan dengan Pagu sebesar Rp579 Miliar yang tersebar pada 27 Provinsi. Ke depan target yang kami harapkan sampai dengan akhir Tahun 2022 dapat terlaksana pada 33 Provinsi dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 15.621 orang dan total upah yang dibayarkan sebesar Rp14,91 Miliar. Dan, dari total kegiatan pendukung padat karya sebesar Rp1,27 Triliun.

**Para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,**

Beranjak pada agenda kedua yaitu terkait Alokasi Anggaran Menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2023. Sebagai pengantar kami sampaikan sepintas terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dengan tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Dirjen Perhubungan Laut mendukung pada arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pembangunan Ibu Kota Negara dengan memprioritaskan pada enam pilar yaitu:

1. Perwujudan angkutan laut yang murah, mudah, simpel dan kompetitif;
2. Peningkatan konektivitas transportasi laut;
3. Penyediaan infrastruktur pelabuhan laut yang berdaya saing;
4. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim;
5. Peningkatan efektivitas penegakan hukum di laut;
6. Peningkatan integritas dan integrasi dalam pengelolaan organisasi.

Program kegiatan Dirjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2023 juga selaras dengan empat sasaran program yang telah dituangkan dalam rencana strategis Dirjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2020-2024. Untuk mendukung tercapainya target rasio konektivitas transportasi laut nasional, prosentasi *on time performance* pada pelabuhan utama dan pengumpul, menurunnya rasio kejadian kecelakaan kapal di laut dan meningkatnya persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan dengan kegiatan seperti:

1. Pembangunan pelabuhan Patimban;
2. *Emergency assistant loan for rehabilitation and reconstruction* Pelabuhan Pantoloan, Donggala dan Wani;
3. Penyelenggaraan angkutan tol laut 35 trayek;
4. Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran;
5. Latihan nasional penanggulangan pencemaran, dsb.

Selanjutnya, terkait dengan pengalokasian anggaran, strategi penganggaran Dirjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2023 secara garis besar berfokus pada:

1. Pemenuhan kegiatan strategis sesuai Direktif Presiden, Menteri Perhubungan dan aspirasi Komisi V DPR RI;
2. Pengalokasian belanja subsidi meliputi keperintisan, tol laut, ternak dan rede secara efektif dan efisien dengan memperhatikan pemenuhan target trayek, frekuensi dan kapasitas penyerapan anggaran;
3. Pemenuhan anggaran *multiyears contract* sampai dengan Tahun 2023;
4. Pengalokasian pada lokasi pendukung kawasan strategis dan prioritas nasional yang mendukung kawasan pariwisata strategis nasional, kawasan industri, Ibu Kota Negara dan daerah tertinggal terluar terdepan dan perbatasan;
5. Indikasi kegiatan baru yang telah memenuhi *readiness criteria* perencanaan melalui pembiayaan SBSN;
6. *Mapping* kesiapan kegiatan yang akan dibiayai oleh pinjaman luar negeri;
7. Pengalokasian kegiatan padat karya dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional;
8. Mitigasi pembiayaan infrastruktur pelabuhan yang terdampak P3D; dan
9. *Mapping* kebutuhan pembangunan gedung kantor dan pengembangan sistem informasi dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan.

**Para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,**

Selanjutnya, dapat kami sampaikan kronologis penyusunan RAPBN Dirjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2023 di mana Pagu Kebutuhan sebesar Rp13,41 Triliun, Pagu Indikatif sebesar Rp8,86 Triliun dan Pagu Anggaran Dirjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8,79 Triliun. Di mana hal tersebut sesuai dengan surat bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait dengan postur Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023. Serta didetailkan pengalokasiannya per Unit Eselon I Kementerian Perhubungan melalui surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan hal tersebut masih terdapat *gap* sebesar Rp4,61 Miliar atau 34,4% antara Pagu Kebutuhan dan Pagu Anggaran Dirjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2023. Lebih lanjut sesuai amanah surat bersama Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2023, Dirjen Perhubungan Laut mendapatkan penyesuaian anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Tambahan rupiah murni sebesar Rp277 Miliar;
2. Tambahan PNBPN sebesar Rp60 Miliar;
3. Penyesuaian sumber dana PHLN sebesar Rp399,7 Miliar meliputi pembangunan pelabuhan Patimban dan *construction (suara kurang jelas) of class I patrol vessel*.

**Para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,**

Selanjutnya komposisi anggaran Dirjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2023 pada masing-masing bidang meliputi:

1. Bidang lalu lintas dan angkutan laut sebesar Rp1,99 Triliun;
2. Bidang kepelabuhanan sebesar Rp2,16 Triliun;
3. Bidang kenavigasian sebesar Rp61,3 Triliun;

4. Bidang KBLP sebesar Rp427 Miliar;
5. Bidang perkapalan dan kepelautan sebesar Rp91,8 Miliar;
6. Dukungan manajemen dan penunjang teknis sebesar Rp3,5 Triliun.

Adapun rincian postur Pagu Anggaran Dirjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2023 meliputi:

1. Belanja pegawai sebesar Rp1,84 Triliun;
2. Belanja barang sebesar Rp3,91 Triliun. Antara lain berupa barang operasional, penyelenggaraan pelayanan angkutan laut, perintis tol laut, ternak dan rede, kegiatan perawatan aset teknis dan penunjang teknis bidang kepelabuhanan, lalu lintas dan angkutan laut, kenavigasian, KBLP dan perkapalan kepelautan; serta
3. Belanja modal sebesar Rp3,04 Triliun berupa antara lain pembangunan pengembangan rehabilitasi fasilitas pokok pelabuhan sebesar Rp1,82 Triliun, pembangunan rehabilitasi fasilitas keselamatan pelayaran SBNP telecompile sebesar Rp260,4 Miliar, pembangunan kapal patroli sebesar Rp76 Miliar, pengadaan perangkat dan pengembangan sistem informasi sebesar Rp27,2 Miliar, pembangunan fasilitas pendukung BLU sebesar Rp7,7 Miliar.

**Para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,**

Selanjutnya berikut kami sampaikan program-program prioritas Dirjen Perhubungan Laut Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan subsidi berupa angkutan tol laut, angkutan laut perintis, angkutan laut kapal ternak dan total sebanyak 158 trayek dengan anggaran sebesar Rp1,59 Triliun;
2. Penyelenggaraan angkutan kapal rede sebanyak 16 unit dengan anggaran sebesar Rp44 Miliar;
3. Pembangunan pelabuhan sebanyak 46 lokasi yang meliputi pengembangan fasilitas pelabuhan di 19 lokasi, penyelesaian fasilitas pelabuhan di 5 lokasi, *replacement* fasilitas pelabuhan di 3 lokasi, rehabilitasi fasilitas pelabuhan di 15 lokasi, pembangunan pelabuhan Patimban dan *emergency assistance loan for rehabilitation and reconstruction* pelabuhan Pantoloan, Donggala dan Wani dengan total anggaran Rp1,82 Triliun;
4. Juga terdapat pembangunan dan rehabilitasi sarana bantu navigasi pelayaran meliputi menara suar, rambu suar dan pelampung suar sebanyak 17 kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp220 Miliar;
5. Pembangunan dan rehabilitasi telekomunikasi pelayaran sebanyak 5 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp39,6 Miliar;

6. Pembangunan kapal patroli sebanyak 10 unit meliputi 2 unit kelas 3, 8 unit kelas 4 dengan anggaran sebesar Rp76,01 Miliar;
7. Serta pengembangan sistem Inaportnet dan pengembangan sistem pelayanan terpadu Simpadu dengan anggaran sebesar Rp27,2 Miliar.

Selanjutnya Dirjen Perhubungan Laut dalam pengalokasian anggaran Tahun Anggaran 2023 juga memprioritaskan dukungan pada program nasional berupa *major project* seperti dukungan pada kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan KEK serta penyelenggaraan transportasi laut yang berbasis Indonesia-sentris. Adapun sebaran kegiatan prioritas nasional dapat kita lihat bersama dalam tayangan berikut ini. Di antaranya meliputi Pelabuhan Tanah Pasir, Pelabuhan Sanur, Pelabuhan Calabahi, Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Ulusiau, Pelabuhan Jailolo, Pelabuhan Agats, Pelabuhan Mor dan sebagainya dengan total anggaran sebesar Rp3,19 Triliun.

### **Para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,**

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan sebaran proyek strategis yang merupakan tindak lanjut pembahasan usulan aspirasi pada rangkaian pembahasan rapat kerja, rapat dengar pendapat dan juga kunjungan kerja bersama Komisi V DPR RI. Di mana rincian kegiatan berupa pembangunan infrastruktur transportasi laut, penyusunan dokumen perencanaan sebagai upaya pemenuhan *readiness criteria*, pengusulan kegiatan pembangunan pelabuhan, sosialisasi keselamatan pelayaran dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan padat karya yang tersebar di seluruh wilayah daerah pemilihan dengan total alokasi sebesar Rp672 Miliar. Adapun rincian sebaran program kegiatan dapat kita lihat bersama pada tayangan berikut ini.

Selanjutnya, terdapat beberapa usulan kegiatan yang masih memerlukan tindak lanjut dengan beberapa catatan. Antara lain:

1. Kegiatan yang masih belum memiliki tahapan pengembangan sebagaimana amanah dalam dokumen rencana induk pelabuhan;
2. Kegiatan bukan merupakan kewenangan dari Kementerian Perhubungan, mengingat status asetnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah ataupun Badan Usaha Pelabuhan. Dan juga;
3. Kegiatan yang masih memerlukan dukungan penyediaan akses jalan; serta
4. Kegiatan yang masih memerlukan persetujuan atau izin prinsip dari Kementerian Keuangan; serta
5. Kegiatan yang merupakan lokasi dengan hirarki pelabuhan pengumpan, sehingga sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah akan dilakukan proses penyerahan aset kepada Pemerintah Daerah melalui skema P3D.

### **Para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,**

Terkait dengan program padat karya pada Tahun Anggaran 2023 telah direncanakan pada beberapa pekerjaan sederhana meliputi fasilitas sisi darat

pelabuhan, serta pemeliharaan gedung kantor, gedung operasional, lapangan penumpukan, drainase, terminal penumpang, gudang dan kegiatan pembersihan dan pengecatan kapal perintis. Kami targetkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 8.043 orang dengan total upah sebesar Rp14,23 Miliar. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden untuk membantu masyarakat mengurangi beban terdampak Covid-19.

Lebih lanjut kami tampilkan sebaran kegiatan penyelenggaraan angkutan laut Tahun Anggaran 2023 meliputi penyelenggaraan angkutan laut perintis sebanyak 117 trayek dengan 42 pelabuhan pangkal, penyelenggaraan 6 trayek angkutan kapal ternak dan penyelenggaraan 35 trayek angkuta laut, angkutan tol laut.

Berkaitan dengan penyelenggaraan subsidi Tahun Anggaran 2022, kami sampaikan hasil capaian realisasi muatan angkutan perintis tercatat untuk muatan penumpang sampai dengan bulan Agustus 2022 sebanyak 443.685 orang, untuk perintis penugasan dalam hal ini oleh kepada PT. Pelnindo. Dan 180.185 orang, untuk perintis swasta. Serta untuk realisasi muatan barang sebesar 51.614 Ton untuk perintis penugasan. Dan, 797.077 Ton untuk perintis swasta. Sedangkan untuk realisasi pelaksanaan angkutan tol laut sebesar 13.059 Teus untuk muatan berangkat. Dan 4.679 Teus untuk muatan balik.

Selanjutnya untuk bidang kepelabuhanan, berikut kami sampaikan sebaran kegiatan pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran 2023 baik berupa kegiatan pengembangan fasilitas pelabuhan, penyelesaian fasilitas pelabuhan dan rehabilitasi atau *replacement* fasilitas pelabuhan sebagaimana dapat kita lihat bersama pada tayangan berikut ini.

Berikutnya terkait kegiatan pembangunan infrastruktur keselamatan dan keamanan pelayaran Tahun Anggaran 2023. Yang terdiri dari kegiatan pembangunan fasilitas kenavigasian, pembangunan kapal patroli KPLP dan kegiatan docking kapal negara dilaksanakan tersebar di seluruh wilayah unit pelaksanaan teknis di lingkungan Dirjen Perhubungan Laut. Adapun sebaran kegiatan tersebut dapat kita lihat bersama dalam tayangan berikut ini.

### **Para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,**

Dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan pula beberapa informasi strategis yang perlu kita ketahui bersama, meliputi:

1. Pada Tahun 2023 terdapat kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) berkaitan dengan rehabilitasi fasilitas pelabuhan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan total alokasi sampai dengan tahapan sinkronisasi dan harmonisasi sebesar Rp136 Miliar dengan daerah calon penerima sebanyak 16 Pemerintah Kabupaten/Provinsi yang sebarannya dapat kita lihat bersama dalam tayangan berikut ini.
2. Yang berikutnya adalah terdapat pembangunan infrastruktur pelabuhan laut yang sudah selesai dan siap diresmikan. Meliputi Pelabuhan Salisingan, Pelabuhan Tanah Kekei, Pelabuhan Mansalean, Pelabuhan

Arwala, Pelabuhan Karas di Papua, Pelabuhan Gili Trawangan, Pelabuhan Pemenang, Pelabuhan Tobilota, Pelabuhan Kaimana dan Pelabuhan Nabire.

3. Juga terdapat kebutuhan penambahan anggaran Dirjen Perhubungan Laut Tahun 2023 sebesar Rp758 Miliar. Yaitu untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak kapal patroli kelas I, II, III dan IV serta *rubber boat* sebesar Rp579,49 Miliar. Juga untuk bahan bakar minyak kapal kenavigasian sebesar Rp73,16 Miliar, dan
4. Pemenuhan selisih kekurangan tambahan anggaran subsidi angkutan laut perintis sebesar Rp106,2 Miliar. Tentu hal ini sangat penting karena untuk pemenuhan kebutuhan operasional kapal patroli KPLP dan kapal negara kenavigasian serta kebutuhan operasional gerai kapal perintis.

**Para Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,**

Demikian paparan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat terkait Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya guna optimalisasi penyelenggaraan dan pelayanan transportasi laut ke depan, kami selaku penyelenggara sub sektor Perhubungan Laut mengharapkan dukungan dan masukan dari para Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat guna upaya perbaikan dan peningkatan kinerja transportasi laut di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Demikianlah, penjelasan yang telah disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Selanjutnya, kami persilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pendapat dan pertanyaan. Kepada teman-teman Anggota yang sudah terdaftar di meja Pimpinan, yang pertama saudari Sadarestuwati dari PDIP. Silakan, Bu.

**F – PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua,

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,  
Pak Dirjen Perhubungan Laut dan juga Dirjen Perhubungan Udara beserta seluruh jajarannya yang saya hormati,**

Saya, beberapa hal mungkin ini tidak cukup tiga menit. Jadi saya minta sedikit waktu lebih karena ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk khususnya perhubungan udara dulu, perhubungan laut dulu.

Untuk perhubungan laut Bapak, setiap kali kami melakukan kunjungan kerja. Sebenarnya cukup prihatin ketika kami melihat bahwa ada salah satu lembaga yang memang sangat diperlukan dan sangat penting keberadaannya. Akan tetapi sampai hari ini untuk dermaganya saja itu masih numpang ke sana kemari, yaitu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Maka dari itu mohon kiranya untuk Badan Pencarian dan Pertolongan ini bisa diberikan *space* untuk berlabuh dari kapal-kapal Basarnas itu sendiri. Karena sekarang kalau kita lihat kadang posisinya di sini, ketika ada kapal datang dia harus geser lagi dan lain-lain ini saya kira rasanya kurang pas. Mereka kita butuhkan, akan tetapi mohon maaf infrastruktur yang mereka butuhkan boleh dibilang sangat minim.

Kemudian juga Pak Dirjen untuk laut khususnya, dengan kenaikan harga tiket pesawat. Ini masyarakat kembali lagi menggunakan apa namanya, transportasi laut untuk jarak antar pulau antar provinsi. Sehingga perlu kiranya ada peningkatan-peningkatan untuk kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna transportasi laut. Termasuk semuanya berkaitan dengan keselamatan para penumpang, yaitu termasuk pelampung keberadaan pelampung jangan sampai kurang dari jumlah penumpang. Pengecekan secara rutin dan berkala ini juga harus terus dilakukan. Karena negara kita ini memang boleh dibilang kadang kala ombak ini cukup tinggi dan ini juga memang membutuhkan satu apa penanganan khusus untuk kapal-kapal yang ada.

Karena apa? Beberapa waktu yang lalu ketika terjadi kejadian kapal tenggelam di Banyuwangi, ya. Saya kira ini sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi yang akhirnya mengorbankan anak buah dari Bapak sendiri, ya. Saya kira hal-hal seperti ini janganlah kemudian terulang yang, mohon maaf mereka yang bertugas di lapangan ini mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Begitu juga untuk apa namanya, data penumpang ini harus jelas. Karena kebiasaan di laut ini data penumpang, jumlah penumpang yang terdata dengan jumlah penumpang yang ada di kapal ini berbeda. Sehingga, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk dalam hal ini adalah kecelakaan laut, mereka tidak bisa mendapatkan, apa, asuransi atau hak-haknya yang lain. Ini untuk Pak Dirjen Laut.

Begitu juga keberadaan pelabuhan-pelabuhan kecil Bapak, mohon ini bisa dievaluasi, diinventarisasi dan dievaluasi. Jangan sampai keberadaan pelabuhan yang menjamur itu kemudian tidak memberikan manfaat yang besar, akan tetapi justru membebani baik itu APBD maupun mungkin APBN, ya.

Kemudian untuk Pak Dirjen Udara, pertama saya ingin juga Dirjen Udara melakukan evaluasi untuk pembangunan bandara baru maupun pengembangan bandara yang lokasinya kurang strategis dan juga lokasinya berdekatan. Saya ambil contoh di Jawa Timur, Jember dengan Banyuwangi ini dekat sekali Pak. Yang akhirnya salah satu pasti, tidak, ya mubazir tidak memberikan manfaat.

Kemudian kedua yang jaraknya jauh dengan pusat keramaian, bandara Kertajati yang kita bangun dengan anggaran yang super besar, sampai hari ini belum bisa dioperasikan. Nah, ini saya ingin tahu kapan mulai dioperasikan dan solusinya apa yang akan dilakukan oleh Kementerian ini. Karena transportasi juga belum terkoneksi, masyarakat masih enggan untuk masuk ke bandara Kertajati. Jadi, mohon ketika ada pengajuan pembangunan bandara, benar-benar, benar-benar yang namanya *feasibility study* ini benar-benar di apa perhatikan, DED-nya diperhatikan semuanya, bukan hanya asal membangun. Walaupun ini dulu masih belum Bapak, tetapi sekarang ini menjadi tugas dan kewenangan Bapak.

Kemudian peningkatan keamanan dan keselamatan penerbangan yang di sini juga anggaran pagunnya ya lumayanlah, sekaligus pemenuhan standar keselamatan penerbangan Rp60,080 Miliar dan Rp52 Miliar. Yang kami inginkan adalah benar-benar diperhatikan untuk *maintenance* daripada pesawat yang akan terbang, kelaikan terbang ini harus di, harus diutamakan. Kejadian terakhir seperti yang disampaikan beberapa hari yang lalu oleh kakak Willem Wandik ada pesawat Susi Air yang jatuh di Papua. Juga beberapa waktu yang lalu, ya mohon maaf pesawat apa pada waktu itu yang mendaratnya juga harus kembali, apa dia keluar dari *runway*, ini beberapa kali terjadi.

Kenapa ini terjadi pada saat ini? Karena beberapa waktu yang lalu ketika covid melanda, pandemi covid. Hampir semua penerbangan kita ini terpuruk dan *maintenance* dari pesawat ini juga sangat lemah. Sehingga sekarang ketika penumpang begitu banyak kembali, pesawat tidak siap. Tetapi, bukan berarti ini harus mengorbankan penumpang, tentunya setiap mau melakukan penerbangan harus dicek secara rutin. Karena hal itu diatur di dalam Bab 8 Pasal 34 sampai 40 yang mengatur kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, di mana setiap pesawat udara yang dioperasikan wajib memenuhi standar kelaikudaraan. Jadi, ini adalah tugas dari kementerian, jangan sampai apa yang menjadi Tupoksinya kementerian ini menjadi lemah oleh karena intervensi atau desakan dari perusahaan maskapai penerbangan.

Kemudian berikutnya saya ingin tanya berkaitan dengan Bandara Halim Perdana Kusuma yang sudah selesai renovasinya. Akan tetapi sampai hari ini saya dengar ternyata masih timbul ketidakpastian pengelolaan dari Bandara Halim ini sendiri. Yang saya masih kurang, apa ya merasa aneh dan sedikit tergelitik. Kita mempunyai Angkasa Pura tetapi kenapa akan diserahkan kepada perusahaan penerbangan swasta. Ini saya mohon penjelasan khususnya untuk Bandara Halim dan kapan akan mulai dioperasikan.

Yang terakhir, saya beberapa waktu yang lalu mengunjungi lapangan udara Atang Sanjaya Bogor. Karena di situ tempat pesawat Basarnas parkir yang ternyata landasannya belum aspal, Bapak. Untuk itu saya mohon dengan sangat, diprioritaskan untuk pengaspalan *runway* di Lanud Atang Sanjaya Bogor ini sepanjang 1.800 Meter. Karena ini bukan sekedar untuk Basarnas saja, ternyata juga pesawat Presiden juga sering mendarat di situ. Juga banyak olahraga *aerosport* yang dilaksanakan di sana. Saya kira penting bagi kita untuk memberikan pelayanan, memberikan infrastruktur yang memadai buat



masyarakat dan dalam hal ini khususnya adalah Basarnas sendiri yang memang sekali lagi saya katakan sebagai satu lembaga yang sangat penting keberadaannya buat kita untuk pencarian dan penyelamatan di dalam setiap apa, kecelakaan laut maupun udara.

Saya kira itu Pimpinan dari saya, saya tidak tanya masalah padat karya tunai. Karena saya tidak punya bandara dan tidak punya laut. Terima kasih, saya akhiri.

*Wabillahitaufik walhidayah.*

*Wasalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Baik Bu Sadarestuwati, itu mantap. Sebelum saya lanjut ke Pak Bakri. Saya minta kita supaya yang sudah disampaikan teman-teman sudah kita tidak ulangi lagi ya. Supaya kita mempergunakan waktu yang sebaik-baiknya, masalah program, teman-teman, masalah program, saya kira sudah selesai ya. Jadi, pengawasan saja yang paling penting, tetapi kita tidak ulang-ulangi lagi karena itu sudah ya. Silakan Pak Bakri, bersiap-siap Pak Irwan.

#### **F – PAN (H.A. BAKRI HM., S.E.):**

Abang saya ini kalau memimpin rapat memang singkat padat, tapi jam 12 makan siang tetap Pak Ketua ya, harus ya. Baik, makasih.

**Pimpinan yang saya hormati,  
Saudara-Saudara saya Anggota DPR RI Komisi V yang saya banggakan,  
Pak Dirjen Udara, Laut yang saya banggakan,  
Dan seluruh teman-teman ini dari laut dan udara yang virtual dari Sabang sampai Merauke, selamat bekerja, sehat selalu untuk anda.**

Saya pertama, menyampaikan apresiasi yang sangat positif ini kepada apa namanya, kepada Dirjen Laut ini paparannya lengkap Bapak. Jadi kalau teman-teman sebenarnya kalau membaca dari nomor satu sampai pada nomor terakhir ini, ini nggak perlu lagi bertanya lengkap ini. Saya berterima kasih banget ini Pak, artinya bahwa mengurangi pertanyaan-pertanyaan bagi Saudara-Saudara.

Cuman saya memperkuat saja ini, di halaman 41 ini laut, itu ada pelabuhan, rehabilitasi gedung dan penataan gedung pelayanan kantor Talang Duku. Nah, ini sudah sering saya ke sana Pak Dirjen, tapi kucuran dananya netes-netes saja Pak. Nah, saya minta tolong mudah-mudahan di Tahun 2023 yang akan datang ini bisa selesai. Karena saya tahu betul pelabuhan Talang Duku itu termasuk pelabuhan besar Pak, pelabuhan besar yang sampai hari ini bisa memberi masukan yang banyak untuk Pemerintah. Begitu juga mungkin KSOP-KSOP yang lain itu juga di Jambi itu seperti Nipah Panjang, terus Kuala Tungkal, Mendahara, Muara Sabak. Nah, ini juga perlu, karena mereka-mereka ini sudah lama sekali Pak, kantor tempatnya itu sepertinya tidak layak. Jadi

minta mungkin mudah-mudahan di 2023 ini tidak lagi tetes-menetes, tapi betul-betul bisa diselesaikan.

Berikutnya menyangkut masalah pelabuhan, ini yang saya lihat di sini ada di halaman 21. Yaitu kegiatan prioritas usulan Komisi V yang masih mendapat catatan tindak lanjut, Jambi, pelabuhan Ujung Jabung. *Nah*, di sini ada masih terkendala ketersediaan jalan akses. *Nah*, saya juga perlu sampaikan ke Pak Dirjen khususnya sahabat saya ini Pak Bagyo, bahwa kemarin kita baru selesai dengan Pak Menteri, sudah itu lanjut dengan Pak Dirjen. *Alhamdulillah* akses yang selama ini yang menjadi hambatan menuju ke sana itu adalah jalan dan *alhamdulillah* kemarin Pak Menteri sudah meyakinkan kita dan menyampaikan pada laporannya bahwa jembatan yang menelan anggaran sampai ratusan miliar itu, di Tahun 2023 ini akan dimulai yaitu jembatan Sungai Rambut, Sungai Rambut.

Dan saya yakin dan percaya mudah-mudahan persyaratan-persyaratan lain seperti umpamanya masalah lahan ataupun segalanya mungkin sambil jalan nanti bisa. Minimal di Tahun 2023 atau 2024 mudah-mudahan porsinya sudah bisa. Karena kalau diharapkan daripada investor Pak, akses jalan ataupun pendukung kalau tidak ada, *nggak* mungkin Pak investor mau masuk, investor masuk minimal memenuhi standar-standar. Oleh sebab itu saya mohon mudah-mudahan untuk Pelabuhan Ujung Jagung ke depan bisa diprioritaskan.

Terus yang kedua yang ketiga adalah masalah, ini di KSOP di berbagai daerah Pak. Saya dapat masukan kita di beberapa daerah itu kawan-kawan di daerah itu kadang-kadang yang jauh dari tempatnya itu yang mau dikatakan malas juga iya, tidak juga iya tapi terkadang-kadang malas mereka berada di kantor. *Nah*, saran saya, bagi daerah pelabuhan ataupun ada dermaga ataupun apa namanya yang ada putra daerah, lebih bagus mengutamakan putra daerah. Salah satu contoh di Jambi ini saya tidak perlu sebut, nah mohon bisa menjadi perhatian. Nah kalau saya ini rajin Pak, tiap kita reses kita kadang-kadang ke sana, ditanya mana? Berangkat, berangkat, berangkat. Kita cek ke Jakarta *nggak* ada kegiatan Pak, *nah*, ini yang perlu mungkin menjadi perhatian. Jadi kalau memang ada putra daerah, putra daerah itulah yang mungkin apalagi daerah ini daerah jauh ya Pak ya.

Itu ke Laut, ke Udara sama juga Pak Dirjen *bismillah*, mudah-mudahan Udara. Saya tidak banyak berkomentar, yang jelas apa yang saya usulkan kemarin lembaran kertas yang disampaikan sudah ada di sini Pak, terima kasih Pak Dirjen. Saya cuma berharap bahwa di Jambi itu ada namanya Bandara Kerinci, Depati Parbo. *Nah*, ini Kerinci ini termasuk daerah wisata Pak, yang betul-betul kalau pariwisata ke sana menggunakan jalan darat wah mikir Pak, sampe 12 jam 14 jam, tapi kalau udara bisa 1 jam. *Nah*, saya berharap mudah-mudahan *airline* yang biasanya seperti dulu itu Wingsair, kalau tidak bisa yang lain Wingsair mudah-mudahan bisa diaktifkan lagi ya. Kalau harga tiket saya pikir daerah itu tidak terlalu bermasalah bagi mereka karena yang datang itu memang orang-orang hebat dan orang-orang mampu.

Itu saja mungkin dan terima kasih atas pemaparannya semuanya cukup baik. Demikian dari saya, cukup sekian, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, Pak Irwan, Pak Fadholi mau ada rapat MKD jadi beliau minta duluan ya. Boleh ya? Ya, silakan Pak Fadholi.

**F – P. NASDEM (Drs. FADHOLI, M.Ikom):**

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Terima kasih Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota, terima kasih,**

Saya karena akan ada rapat MKD yang agak serius.

**Bapak Dirjen yang saya hormati,**

Yang pertama tentu saya memberikan apresiasi kepada layanan baik Dirjen Laut maupun Dirjen Udara ini sudah cukup bagus. Ada beberapa hal saja di saya yang pertama adalah layanan kargo Pak ya. Jadi, layanan kargo baik udara maupun laut ini dalam rangka untuk bisa mendukung pemulihan ekonomi ini mungkin perlu ada skala prioritas. Karena ini akan mempermudah apa namanya, pendistribusian barang antar pulau, ini menjadi bagian yang sangat penting untuk bisa diperhatikan. Walau selama ini sudah cukup bagus ya, tetapi ini menjadi bagian yang sangat penting, karena itu akan bisa membantu untuk bisa paling tidak keterjangkauan harga, itu kalau itu jadi.

Kemudian yang kedua, estimasi dengan kemungkinan adanya kenaikan harga BBM, ini kira-kira ini nanti ada *nggak* kenaikan ongkos daripada kargo ini, ya ini kalau bisa itu agak ditekan, agar nanti tidak menjadi gejolak harga di tengah-tengah masyarakat. Ini kan saya yakin bahwa dari Bapak Dirjen ini mempunyai satu peran yang sangat signifikan.

Kemudian yang kedua, ini terkait dengan pelabuhan penumpang di Kota Semarang, Pak. Ya ini mungkin perlu layanan yang lebih bagus karena di situ juga jadi bagian yang sangat penting. Termasuk juga layanan di apa Ahmad Yani, Pak, ini di Ahmad Yani ini sekarang kan penerbangannya sudah mulai sepi Pak. Sehingga kalau sudah sore itu sudah banyak yang tutup itu toko-toko itu di ini. *Nah*, ini biar agak hidup kembali, mungkin *nggak* untuk bisa layanan ini agar apa penerbangan dari Semarang ini ke beberapa daerah ini bisa lebih diaktifkan kembali, Pak. Mungkin ada beberapa jalur yang mungkin perlu, salah satunya adalah misalkan jalur ke Manado, ini juga susah itu Pak ini. Jadi, Semarang mau ke Manado ini kalau mau ke Manado harus muter dulu ke mana-mana itu, kalau Makassar sudah ada.

Kemudian saya pikir Semarang ini menjadi bagian yang cukup penting karena ini kan ada di tengah-tengah pulau Jawa Pak antara Jawa Timur, Jawa

Tengah dan Jawa Barat. Maka tengah-tengahnya kan Semarang, agar ada layanan penerbangan ke lintas Provinsi ini bisa diperbanyak frekuensinya. Saya pikir itu akan menjadi bagian yang sangat penting untuk bisa mendukung perekonomian di Jawa Tengah. Termasuk juga untuk para wisatawan di Kota Semarang, ini maka layanan penerbangan kalau bisa ada penerbangan perintis Pak. Sehingga kalau ada penerbangan perintis terutama ke daerah-daerah yang memang saat sekarang ini masih jarang ya, masih jarang itu ke *Makas*, Manado misalkan, ini kan tidak ada di situ mesti harus putar. Dan rata-rata kalau ke beberapa daerah dari Semarang itu kan harus putar itu, ada transitnya ada di Jakarta dan kebanyakan kan mesti harus transit di Jakarta.

*Nah*, penerbangan perintis ke daerah yang sangat strategis mungkin itu perlu dirintis. Saya pikir itu dan saya memberikan apresiasi dan dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih atas segala memberikan apresiasi atas semua kerja-kerja yang saat ini selama ini sudah cukup bagus.

Terima kasih Pak Ketua.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, Pak Irwan, bersiap-siap Ibu Cen. Silakan Pak Irwan.

#### **F – P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan Komisi V DPR RI yang saya hormati,  
Serta rekan-rekan Anggota Komisi V yang saya banggakan,  
Bapak Dirjen Perhubungan Udara, Bapak Dirjen Perhubungan Laut,  
Bapak Direktur serta seluruh pejabat Kementerian Perhubungan yang  
hadir pada rapat pagi hari ini,  
Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan,**

Kami mulai dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sebelumnya kami apresiasi terhadap pembangunan yang sudah berjalan sejak Tahun 2020. Beberapa pelabuhan kita di Kaltim sudah kita lakukan rehabilitasi, ya baik sisi laut maupun darat. Dan kami lihat untuk rencana di Tahun 2023 sudah apa namanya, beberapa masuk tapi kami ingin melakukan penguatan terutama di porsi anggaran, ya. Pertama pengembangan fasilitas pelabuhan darat Sangkulirang, kami sampaikan bahwa Sangkulirang ini memang tempat kelahiran saya ini Pak Dirjen. Saya tahu sekali pelabuhan ini dan sering sekali saya tinjau, 2020 itu waktu saya tinjau itu kontribusi PNBPN-nya tuh masih Rp20 Miliar/Tahun. Sekarang sudah naik 100% ya Rp40-Rp50 Miliar.

Karena memang di wilayah ini baik dari hulu sungai kemudian sisi lautnya memang dikelilingi oleh sektor sawit juga, pertambangan. Kemudian pelabuhan ini juga digunakan untuk bongkar muat logistik juga material konstruksi. Jadi, saya melihat sisi daratnya ini memang perlu kita kembangkan

ya, Tahun 2021 sudah ada penanganan. Tapi, kita pengen ini lanjutannya juga maksimal, optimal. Saya lihat informasinya masih tiga setengah, saya pikir itu bisa ditambah sehingga beberapa pembangunan gudang ya, ataupun kemudian lantai pelabuhannya ini sisi daratnya bisa juga. Kalau sekarang masih ini becek, beberapa juga jalan yang masuk dari pelabuhan itu saat kendaraan mengangkut itu masih amblas dan lain-lainnya. Sehingga saya pikir memang ini perlu penanganan sisi daratnya, itu penguatannya untuk Paspel Darat Sangkulirang.

Kedua, terima kasih ini kami dorong sejak 2020 yang rehab Paspel Paser, Tanah Paser ini kendalanya di awal adalah status kawasan hutan dan sekarang karena ada di dalam kawasan konservasi dan sekarang sudah selesai. Dan, saya berharap pelabuhan ini bisa tuntas dengan lanjutan di 2023 ini, sehingga ini (suara kurang jelas) mendukung ya, nanti terkait fungsional IKN. Jadi terima kasih banyak, harapan kita bisa tuntas di 2023.

Kemudian ini yang sangat kami harapkan terkait penyusunan DED dan pembangunannya. Jadi, jangan sampai tahun depan itu baru disusun DED-nya, kami harapkan tahun depan sudah dibangun untuk lampu suar dan navigasi. Karena di Muara Manggar ini, ini aktivitas nelayan memang sangat tinggi karena ini juga tumpuan untuk apa namanya, konsumsi ikan ya, hasil laut di Kaltim. *Nah*, masalahnya muaranya itu ada pendangkalan dan jika malam hari atau subuh hari itu memang gelap. Kemarin kami sudah meninjau, dan jika ini ada, ada, apa namanya rambu suar, ya. Kemudian apa rambu suar bisa masyarakat ada panduan pada saat keluar atau masuk setelah melaut, *Insya Allah* korban jiwa juga bisa dihindari. Karena sudah beberapa nih nelayan yang meninggal ya, kalau kerusakan kapal tuh sudah sering banget, ya. Sehingga kita jangan tunda lagi misalnya tahun depan baru DED-nya, 2024 hanya untuk membangun navigasi butuh dua tahun, itu saya pikir dari sisi prioritas ini sangat-sangat penting.

Kemudian, terkait pembangunan terminal, penanggulangan pencemaran. Waktu itu saya meninjau sama KSOP, Pak Takwim, lahannya sudah siap. Saya pikir ini sangat-sangat bagus nih apa namanya program dari Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Karena teluk Balikpapan ini sering sekali, dulu malah pernah terjadi ya pencemaran teluk Balikpapan dengan terbakarnya kapal, ya. Sehingga terminal ini terobosan yang kami sangat apresiasi dan kami sangat harapkan bisa selesai di tahun depan, apalagi mengingat sekarang dengan adanya IKN. Maka intensitas kapal dan lain-lainnya makin banyak yang melalui teluk Balikpapan.

Kemudian, yang terakhir untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Di Kabupaten Berau itu ada Pelabuhan Tanjung Redeb yang posisinya di dalam sungai, saya juga sudah meninjau. Saya bisa sampaikan gini karena saya sampai tinjau semua dan kami mengapresiasi semua KSOP maupun KUPP yang ada di Kaltim. *Nah*, yang khususnya di Berau ini kayaknya kurang tuh, kurang satu segmen itu untuk dermaganya. Mungkin bisa ditambah sehingga apa namanya, pelayanan kapal atau pelabuhannya bisa optimal karena kontribusi PNBP-nya juga bagus.

Itu yang kami sampaikan untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Tentu kami harapkan bisa apa namanya, optimal terutama terkait porsi anggarannya. Bukan sekedar apa namanya, mengakomodasi kegiatannya.

Kemudian, untuk Dirjen Perhubungan Udara, kami harapkan Pak, ini sejak tahun lalu. Tadinya sudah masuk, tapi kok tiba-tiba belum dilaksanakan, *landscape*, *landscape* bandara APT Pranoto Samarinda. Pak, kami sudah baiki Pak ya, melalui Kementerian PUPR, kami lebari jalannya dari Samarinda. Dari Kota Samarinda menuju bandara kita rigid beton, tapi halamannya ini kita harus perbaiki Pak, ini tidak mencerminkan sebuah bandara di Ibu Kota Kaltim. Ya saya pikir dengan penanganan *landscape* mempercantik, ya bandara kita, apalagi pasca pandemi juga mulai turun, apa namanya penumpang juga banyak, kemudian tambahan pesawat juga mulai. Jadi, kami sangat-sangat berharap bisa dilaksanakan tahun ini sehingga kita tahun depan ada fokus pengembangan APT Pranoto untuk dukungan IKN juga ke depannya.

Kemudian, terkait bandara Uyang Lahai Pak, di Kombeng Wahau di Kabupaten Kutai Timur. Kami harapkan tahun depan bisa kemudian peningkatan *runway*-nya, karena sekarang masih tanah. Sementara ini sama Pak, ini juga dikelilingi oleh Kecamatan yang merupakan pusat perkebunan sawit di Kaltim. Jadi, pasti bandara ini akan berkembang dengan baik, tetapi kalau *runway*-nya masih seperti itu saya pikir itu *nggak* optimal, bahkan sering mau mendarat kembali lagi balik ke Balikpapan. *Nah*, harapan kami tahun depan bisa ditingkatkan. Kami tadi barusan hubungi Pemerintah Daerahnya, mereka siap untuk apa namanya, misalnya MoU dan lain-lain terkait aset nantinya. Harapan kami sangat besar Pak, terkait Uyang Lahai dan, bandara Uyang Lahai ini karena di Kutai Timur itu tidak ada bandara apa namanya, perintis apalagi bandara penghubung, yang ada bandara *private* ya, bandara tambang.

Kemudian yang terakhir Penlok, Pak, Penetapan Lokasi Bandara Ujoh Bilang. Mungkin kita kalau ini *nggak* apa-apa Pak kita fokus di Penloknya dulu kejar, karena tahun depan Pemerintah Daerahnya, Mahakam Ulu ini adalah daerah perbatasan Pak. Saya pikir sangat benar sekali kalau ada bandara penghubung di sini. Kalau Penloknya bisa Bapak keluarkan tahun ini, mereka tahun depan akan ada pematangan lahan ya terkait ini. *Nah*, nanti kita baru bicara dana untuk pembangunan bandaranya. Tapi saya pikir Penloknya bisa dipercepat Pak.

Mungkin itu Pimpinan, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Ya, Pak Irwan kayaknya belum makan tuh, lemas sekali ngomongnya. Jadi, kalau sebelum rapat tadi buka sudah ada komunikasi itu bagian yang tidak terpisahkan. Jadi, cuma ingatkan saja, jangan diuraikan gitu Pak Irwan. Bu Cen, selanjutnya siap-siap Bu Sarce Bandaso.

**F – P. GOLKAR (CEN SUI LAN):**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi V,  
Yang saya hormati Pak Dirjen Hubungan Udara dan Laut beserta jajaran,**

Pak saya ke Dirjen Hubungan Udara, Pak Dirjen. Bagaimana progres penurunan harga pesawat? Karena ini sebenarnya kan Tupoksi kita di.

**KETUA RAPAT:**

Bu Cen, harga tiket, bukan pesawat.

**F – P. GOLKAR (CEN SUI LAN):**

Iya harga tiket pesawat.

**KETUA RAPAT:**

Harga pesawat itu mahal.

**F – P. GOLKAR (CEN SUI LAN):**

Karena Pak Dirjen, itu kan Tupoksi kita di Perhubungan Udara. Tapi yang saya lihat itu *statement* dari Perhubungan Udara itu sangat sedikit, malah diambil alih oleh Pak Menteri Menparekraf, Pak Menteri BUMN, mereka sudah langsung menyampaikan tanggal berapa-berapa mau turun, dari Perhubungan Udara kan diam-diam *bae*. Jadi tolong agak sigap, karena kita-kita Komisi V yang akan ditanya.

Saya langsung ke Dapil, Pak Dirjen. Terima kasih ada Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah, Pengembangan Bandar Udara Letung Anambas, Pengembangan Bandar Udara Ranai dan Bandar Udara Dabo. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan tidak hilang. Dengan adanya Pengembangan Bandara Udara Letung, kita mengharapkan Pak Presiden bisa datang. Karena selama ini mungkin alasannya nggak bisa mendarat pesawat, sehingga tidak pernah ada kunjungan Pak Presiden ke Anambas. Padahal Anambas adalah pulau terluar yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah, harus ada intervensi jangan dibiarkan sendiri saja. Jadi, terima kasih, mudah-mudahan ini bisa membuka mata Pemerintah untuk melihat ke sana.

Saya ke Pak Dirjen Laut, Pak Arif kapan ke Batam? Kalau ke Batam ngasih tahu jangan saya lihat di media. Karena saya lihat di media mau meresmikan sesuatu, saya Komisi V nggak tahu, Pak Arif.

Saya berbicara mengenai Dapil ya Pak Arif ya. Saya minta supaya dermaga di Anambas tolong dibantu revitalisasi, itu sudah tidak layak karena itu dibangun zaman Belanda, jangan nanti sudah sampai roboh baru kita sibuk. Karena itu merupakan kepentingan yang sangat urgensi, itu untuk masyarakat, transaksi kehidupan mereka di situ, dari nelayan, dari untuk barang-barang dan untuk penumpang. Jadi tolong di inikan Pak Dirjen, diprioritaskan.

Karena saya lihat di sini banyak kenavigasian tapi itu tidak masuk juga, pengadaan pemasangan fender dan lampu pelabuhan pulau Laut. Saya lihat banyak di situ, tapi yang Anambas itu belum. Jadi tolong ya Pak Dirjen ya. Itu saja Pimpinan terima kasih, terima kasih semua.

#### **KETUA RAPAT:**

Itu kalau Bu Cen, cepat tegas. Lanjut Bu Sarce, siap-siap Pak Syaifuddin.

#### **F – PDIP (SARCE BANDASO TANDIASIK, S.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,  
Shalom,  
Salam sejahtera buat kita semua,*

#### **Yang terhormat Pimpinan dan rekan-rekan Komisi, Pak Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara,**

Jadi saya langsung saja ke Dapil Pak, karena banyak yang sudah disampaikan rekan-rekan, saya langsung ke Dirjen Udara. Di sini sudah saya sampaikan beberapa kali mengenai bandara Buntu Kunik, Pak. Sampai saat ini masih membutuhkan perpanjangan *runway* dengan lampu-lampu yang ada di lokasi bandara. Karena ini sangat menunjang pariwisata, karena sekarang covid hampir selesai. Jadi, wisatawan-wisatawan yang dari luar itu sudah mulai datang ke Toraja. *Nah*, kalau bandara masih seperti ini mungkin wisatawan masih berpikir akan datang ke Toraja, *nah*, itu aset kita yaitu pariwisata Toraja Pak.

Saya juga di sini menyampaikan Pak, yaitu ada bandara di daerah kami di Luwu Utara bersama dengan Pak Fauzi yaitu Bandara Seko dan Rampi. Berapa kali Pak Fauzi menyampaikan tapi sampai saat ini belum ada penanganan dan perhatian khusus buat dua bandara. Ada juga bandara yang ada di Luwu Utara ya, di Kabupaten di Luwu di Bua. Jadi, tolong Pak mungkin di Tahun Anggaran 2023 bisa kita masukkan salah satu anggaran.



Di sini juga saya sampaikan yang ada di Luwu Timur Pak, yang Sorowako, kebetulan sudah pengalihan aset ke Pemerintah. *Nah*, di sana itu yang masuk yaitu pesawat ATR mudah-mudahan ke depan bisa ada perpanjangan *runway* dan landasan pacu. Karena memang di sana itu landasannya sangat kecil Pak, pendek. *Nah*, antusias masyarakat itu untuk naik pesawat darimana mau ke Serako itu banyak. Tapi, kemarin masih dikuasai sama perusahaan yaitu Vale, tapi puji syukur sudah diserahkan pada Pemerintah. Jadi mungkin itu, (suara kurang jelas), supaya Tahun Anggaran 2023 juga nanti bisa direalisasikan. Karena di sini saya lihat masih tahap pengalihan aset Pak, mudah-mudahan secepatnya PT. Vale mengalihkan aset kepada Pemerintah.

Saya menuju ke Dirjen Laut, di sini Pak, ada perencanaan dan dokumen pelabuhan Palopo. Jadi, saya lihat juga di sini pelabuhan Palopo ini kayaknya kurang terurus Pak. Jadi, mungkin bisa ditinjau dan diberi sedikit bantuan buat pelabuhan Palopo dan pelabuhan Belopa. Mudah-mudahan kapal-kapal besar bisa masuk mengangkut barang-barang dari luar.

Berikutnya Pak, di daerah Luwu Timur juga kebetulan itu daerah tempat tinggal saya Pak Sorowako. Itu sudah masuk kapal perintis ada dua, Sorowako dan Timampu. Tapi di situ kendalanya Pak, belum ada gedung untuk tempat penjualan tiket dan tempat ruang tunggu. *Nah*, di sana penjualan tiket itu masih amburadul Pak, ke sana kemari orang mau beli tiket cari tempat di mana, jadi belum terarah. Jadi, mungkin diperhatikan juga untuk Tahun 2023 dengan padat karya tunai Pak.

Terima kasih Pimpinan, ini saja.

*Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Iya, sebelum kita ke Pak Syafiuddin, Pak Syafiuddin maaf. Karena sesuai kesepakatan kita tadi, jam 12 kita *break* makan, saya skors 30 menit, kita makan siang.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 12.00 WIB)**

**(SKORS DICABUT PUKUL 12.30 WIB)**

**F – PKB (H. SYAFI UDDIN, S.Sos.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Pak Dirjen, ini orang-orang baik semua ini Pak Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara.**

Saya yakin kebaikan Pak Dirjen ini, namun ada beberapa sedikitlah kira-kira untuk saya suarakan, terutama di Pak Dirjen Perhubungan Udara ini. Pak Dirjen, untuk evaluasi anggaran dari Rp7 Triliun tadi, itu kan sudah 50% ya realisasi ya. Dan tentunya di 2022 kemarin itu, itu seperti yang saya suarakan ke Pak Menteri terkait dengan peresmian bandara, yang di Sumenep. Tolong ini ke depan Pak, ini banyak suara mewakili teman-teman. Ini di 2023 ada peresmian banyak bandara-bandara, kalau memang itu dilaksanakan, teman-teman DPR RI yang dari Dapilnya itu diundang gitu. Ya biar tidak seperti saya yang kemarin itu, saya ngenes juga itu, tapi saya nggak WA Pak Dirjen karena saya nunggu sampai subuh, sampai subuh nggak ada telfon dari Pak Dirjen. Jadi, itu untuk ke depan Pak Dirjen tolong karena memang teman-teman apalagi sudah mendekati Tahun 2024 ini Pak Dirjen. Jadi hanya ingin nuansa politisnya yang masuk ke kita bahwa kita sebagai Anggota DPR RI memperjuangkan daerah pemilihannya. Itu ke Pak Dirjen Perhubungan Udara.

Pak Dirjen Hubla, tadi sudah disampaikan terkait aspirasi saya yang di (suara kurang jelas). Jadi ada apa namanya, karena mau dilimpahkan dialihkan ke Provinsi. Namun tentunya kita juga sesuai dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 bahwa Madura ini kan, dua Kabupaten ini masuk miskin ekstrim Pak. Jadi, tentunya selain memang kelayakan dari apa namanya, (suara kurang jelas) tradisional ya, yang memang banyak yang rusak, perlu tentunya ini revitalisasi atau mungkin pengembangan apa. Walaupun proses menunggu proses ke Pemerintah Provinsi kan agak lama Pak.

Saya ingin bahwa fungsi daripada pelabuhan tradisional ini tetap jalan, walaupun ada rencana untuk dialihkan dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi. Ada beberapa kasus yang sudah saya sampaikan secara informal di Pelabuhan Taten itu sudah, Pemerintah Provinsi ada *goodwill* sebetulnya ya kan. Namun karena ada beberapa hal yang berbenturan dengan aturan, ini maka di-*pending*. Saya berharap Dirjen Perhubungan Laut untuk secepatnya, kalau memang dialihkan itu secepatnya prosesnya, biar apa, tidak *stagnan* Pak, tidak menggantung gitu. Karena Madura ini ibaratnya seperti kompetisi tarik tambang ya, kalau tarik tambang itu kan yang paling mundur yang menang Pak, nah Madura seperti itu. Jadi, tolong bukan tarik tambang yang terjadi di Madura ini, maka saya berharap semua anggaran ini terutama memang ini kelayakan dari pelabuhan-pelabuhan tradisional seperti Brenta dan lain-lain ini perlu juga disentuh anggaran-anggaran. Jangan sampai digantung karena persoalan pelimpahan apa namanya, kewenangan atau status dari pelabuhan-pelabuhan tradisional yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat ini.

Mungkin seperti itu Pimpinan, sedikit saja, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf.

*Wallahumuafiq Illaqwamitoriq  
Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Makasih Pak Syafiuddin, Pak Soehartono silakan, Pak Soehartono.

**F – P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):**

Terima kasih Ketua.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Ketua yang saya hormati dan Anggota Komisi V yang saya hormati juga. Pak Direktur Jenderal Udara berikut jajarannya yang saya hormati, dan Pak Direktur Laut yang saya hormati,**

Saya singkat saja Pak, Dapil saya itu Dapil neraka untuk perhubungan. Saya Dapil seputar Madiun, untuk udara klaim tidak bisa, laut juga nggak ada. Jadi bagi saya kalau menyuarakan Dapil itu seolah-olah tidak ada. Kita di seputar Madiun 6 Kabupaten itu sudah sepakat mendirikan bandara, ya 10 tahun yang lalu *ropat-rapat* saja, finalisasinya itu tidak boleh. Ternyata klaim satu-satunya bandara yang nggak bisa dikerjasamakan dan di seputar itu tidak boleh membangun udara ya di Dapil saya Pak, di Dapil Madiun. Namun saya ingin menyuarakan itu Pak, keprihatinan juga ya, Bapak keduanya ini kan selaku regulator. Jadi, memutuskan sesuatu yang terjadi di wilayah kekuasaan Bapak baik laut maupun udara. Sehingga pertimbangannya itu harus matang, matangnya itu dasarnya apa? Misalnya B2B (*Bussiness to Bussiness*) itu ya, tadi di depan sudah diuraikan gitu.

Bandara udara di Jawa ini sudah banyak yang tidak kompetitif atau rugi, lah hal-hal seperti itu, Bapak selaku regulator harus apa harus kekeh, harus kuat. Karena itu semua dibangun dari uang rakyat, nah itulah yang menjadi catatan, regulator harus kuat di dalam hal memegang prinsip efisiensi. Karena daerah, walaupun dibiayai oleh daerah, yang membiayai juga rakyat, nah itulah fungsi dan peran dari kedua Dirjen ini.

Saya melihat laut juga demikian dan saya tertarik oleh kedua lembaga ini, karena ini menjadi sumber pendapatan negara, sumber pendapatan negara. Bandara jangan sampai rugi menjadi, apalagi laut. Ketika saya kunker saya tertarik sekali dan kagum mudah-mudahan kelak pelabuhan Kijing dan Patimban itu menjadi andalan untuk bangsa kita. Karena itu kalau kita nilai dengan rupiah pendapatannya sudah saya pikir itu per tahun triliunan itu. Dua, pelabuhan Kijing dan Patimban, sudah.

Hal-hal seperti ini Pak, jadi tugas Dirjen harus bisa memilih oh ini sangat efisien punya prospek dan sebagainya dan sebagainya. Prospeknya itu berapa? Okelah jangan kemudian ini akan layak dan bagus 50 tahun lagi, jangan terlalu jauh lah, pikirnya 20 tahun saja atau 10 tahun kemudian *nggak* layak, jangan diberi izin. Jadi yang *keukeuh* Pak, regulator dua ini, karena ini, ini penting institusi penting, penting dan menjadi andalan pendapatan negara.

Terus kemudian untuk DAK pelabuhan misalnya. Ya kita harus memperhitungkan jarak dan wilayah. Misalnya begini, tadi di saya sudah mendengar gitu ya ketika tol itu sudah ada, itu jarak itu menjadi sempit. Sehingga bandara-bandara yang ada di mana-mana terutama di Jawa itu sudah *nggak*, kurang berdaya guna lah itu. Mungkin nanti Sumatera kalau

tolnya sudah *connect*, itu juga tidak perlu banyak bandara. Sekarang orang Semarang saja ke Jakarta itu kita bisa hitung Pak, naik pesawat dengan naik apa darat jalan darat waktunya sama, iya. Saya misalnya contoh Pak saya orang Madiun, kalau saya jalan darat 6 jam. Tapi kalau saya naik pesawat lewat Solo saja kalau dihitung juga hampir 6 jam. Kita berangkat ke Solo, Solo ke Jakarta, Jakarta kerumah sama saja Pak itu. Jadi hal-hal itulah yang perlu mendapat perhatian.

Kemudian tadi saya juga mendengar padat karya yang diusung oleh laut. Saya minta untuk padat karya itu jangan dimasukkan dalam kontraktual baik udara maupun. Kontraktual misalnya anda membangun sebuah jalan atau apa di situ. Kemudian seperti seolah-olah dipaksakan yang kontraktual itu sebagian dimasukan pada padat karya. Lah, sebenarnya mau kita, mau kita di Komisi V itu padat karya itu ya murni. Sehingga misalnya padat karya itu membuat selokan, itu kontrak terpisah yang tidak di kontraktualkan. Sehingga kita-kita yang dari Komisi V ini bisa partisipasi, ikut mengatur. Tujuannya agar komunikasi kita, Komisi V ini atau Anggota DPR ini bisa langsung, apa, membantu rakyatnya untuk bisa bekerja dan dapat hasil dari itu, itu tujuan padat karya tidak lebih hanya seperti itu.

Saya kira itu saja Pak Dirjen, Pak Ketua, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Makasih Pak Soehartono, Pak Syarief Abdullah silakan.

**F – P. NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):**

Terima kasih,

**Pimpinan yang saya hormati,  
Pak Dirjen Udara dan Dirjen Laut beserta seluruh jajaran,  
Rekan-rekan dari Komisi V yang saya hormati,**

Pertama berkaitan dengan Dirjen Laut, ada satu pelabuhan itu yang saya kira perlu dioptimalkan. Mungkin supaya, supaya apa, supaya pelabuhan itu bisa beroperasi Pak, di daerah saya itu ada sudah sekian lama itu pelabuhan Padang Tikar itu, kan itu cukup besar itu sebenarnya biaya yang dikucurkan untuk itu. Mungkin bisa bekerja sama dengan Dirjen Darat mungkin, berkaitan dengan antar sungai ya untuk digunakan. Tadi kan dibangunnya pelabuhan itu saya memperkirakan untuk digunakan bongkar muat kapal. Tapi nampaknya di situ tidak ya dengan kondisi dermaga tidak terlalu besar, kan daerah itu sekarang itu malahan tempat lewatnya berkaitan dengan sumber daya alam mineral, bauksit, pasir kuarsa, semuanya kan lewat situ tapi tidak mungkin untuk menggunakan pelabuhan itu.

Kemudian kaitan dengan Dirjen Laut, kira-kira mungkin bisa menginventarisir juga Pak, berkaitan dengan kapal-kapal kita sekarang. Dengan kondisi sekarang ini mungkin dengan, saya memang tidak terlalu ini juga untuk berbicara masalah tiket ini dengan ambang batas terendah dan terbawah, karena memang avtur ini luar biasa juga, mau subsidi juga kita kewalahan. Namun dengan demikian mungkin kapal-kapal kita yang dulu kan ada kapal-kapal cepat kalau itu. Itu, itu sampai ke mana itu, apa sudah masih ada itu atau sudah barang-barang itu semua sudah dilepas gitu ya. Padahal itu juga bisa membantu terhadap memberikan solusi dengan harga tiket yang begitu murah.

Kemudian, Dirjen Udara yang pertama keterbatasan, nah ini saya perlu tadi saya juga sudah sampaikan Pak. Tapi ini mungkin perlu ada penegasan bagi kita, terutama bagi *airline-airline* ini, termasuk saya. Supaya ada, ada kepastian terutama penerbangan antar Kabupaten ya. Saya itu kemarin ke Kapuas Hulu, jaraknya sekitar 15 jam ditempuh, kebetulan kita ada acara di sana dengan Gubernur apa, berkaitan dengan peringatan hari pramuka. Ternyata sehari sebelumnya pesawatnya dibatalkan tidak berangkat, nah ini kan membuat persoalan bagi kita itu. Tapi, ya syukur masih ada satu hari dengan tempuh sekitar 14 jam ke daerah itu, selesailah sampai di sana kemudian setelah itu kegiatan kita kembali ke dari Kapuas Hulu ke Sintang. Kebetulan ada penerbangan juga dari Sintang yang ke Pontianak, karena saya mau ikut rapat kemarin di sini, sudah *connect* dengan pesawat ke Jakarta. Ternyata sampai ke Bandara Sintangnya belum berapa lama diumumkan pesawatnya tidak berangkat dari Pontianak. Akhirnya kita harus juga lewat darat lagi.

Maksud saya perlu ini harus dipertegas kepada *airline*, apakah dia mampu atau tidak supaya ada kepastian masyarakat. Ya, kalau memang punya kemampuan itu dengan saya kira masalah tidak juga terlalu ya karena mengerti juga dengan kondisi yang ada dengan tiket yang begitu tinggi, mahal Pak tiketnya Rp1 Juta, lebih kurang Jakarta itu kita pakai Garuda Rp1.700.000,- ya sekitar Rp1.700.000,- juga. Tetapi, penumpangnya banyak ramai, apa memang karena kebutuhan. Nah, ini mungkin perlu bagaimana ya haruslah apa solusinya terhadap untuk mempercepat, karena ini juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Ini saya kira yang perlu menjadi perhatian.

Yang kedua kaitan saya kembali lagi ini minta kepada, karena kita sudah ditetapkan penloknya, ya. Saya kira kalau sudah kita tetapkan Bandara Kayong itu merupakan bandara yang di sisi utara, melayani masyarakat di wilayah selatan, ya Ketapang, Kayong dan sebagainya itu. Saya kira ya kita fokus saja Pak, karena jangan sampai kita nanti tidak fokus, kemudian juga, ya maaf saja lah bandara yang lama juga saya kira sulit untuk dikembangkan itu. Ya untuk dikembangkan pasti sudah tidak memungkinkan itu. Makanya memang bandara yang di Kayong ini ada satu sisi kewajiban Pemerintah, Kementerian sesuai dengan MoU-nya kalau saya lihat itu, untuk berkaitan dengan DED buat sisi udaranya yang belum direalisasikan.

Namun dengan demikian juga tentu kita sudah perlu untuk bagaimana berkaitan dengan *land grading*-nya terhadap bandara. Karena sekarang Kabupaten sudah membebaskan 85% sudah Pak, dari kebutuhan lahan yang

diperlukan dan sekarang sudah proses sertifikat. Saya kira kewajiban-kewajiban daerah sudah dipenuhi ya, sudah berusaha untuk dipenuhi. Namun dengan demikian tentu kita berharap Pemerintah Pusat untuk secepatnya juga berkaitan dengan ini, artinya ya kalau memang sudah itu ya kita dorong saja. Jangan sampai kita membuat lagi malahan anggaran terbuang kurang efektif terhadap hal ini. Saya kira ini saja Pak, dari kami, atas perhatiannya terima kasih.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Makasih Pak Syarief. Pak Irmawan, siap-siap Pak Harvey.

**F – PKB (H. IRMAWAN, S.Sos., M.M.):**

Terima kasih,

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang kami hormati Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V,  
Yang kami hormati Bapak Dirjen Udara, Dirjen Laut beserta jajarannya,**

Saya langsung saja pertama ke Dirjen Udara ini, Pak. Terima kasih kami melihat di paparan Bapak tadi, apa yang kami sampaikan pada saat raker kemarin telah terakomodir di sini. Yaitu pembangunan Bandara Malikusalleh, pembangunan Bandara Gayo Luwes, pembangunan, pengembangan ya? Pengembangan Bandara Gayo Luwes dan pengembangan Bandara Aceh Singkil. Meskipun sesungguhnya masih banyak Pak, bandara-bandara kecil yang di Aceh itu perlu kita kembangkan.

Tapi saya ingin sampaikan kepada Bapak bahwa pengembangan Bandara Gayo Luwes ini dengan Bandara Singkil ini, kita berharap ini bisa, bisa maksimal, Pak. Artinya jangan hanya sekedar kita akomodir kemudian kita kerjakan satu potong, *toh* tahun-tahun berikutnya akan kita bicarakan lagi di sini. Saya berharap apa yang sudah terakomodir ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan secara bagus sehingga dia kelar persoalannya Pak. Jadi, tahun-tahun yang akan datang tidak lagi kita bahas terkait dengan Bandara Gayo Luwes dan Bandara Aceh Singkil ini.

Kemudian ada persoalan lain lagi Pak, di sini saya lihat ketika bandaranya sudah kita kembangkan. Yang mana di Aceh itu masih banyak bandara-bandara yang harus kita subsidi sebenarnya Pak, terutama Bandara Gayo Luwes ini. Kalau hari ini masih ada penerbangan subsidi Gayo Luwes-Banda Aceh kalau saya tidak salah. Dan kita kemarin di rapat-rapat sebelumnya pernah kita usulkan agar subsidi ini jangan hanya Gayo Luwes-Banda Aceh, tetapi kita ingin Gayo Luwes ke Medan. Tetapi, di dalam paparan ini malah justru saya lihat tidak nampak ada lagi Pak. Jadi, saya berharap jangan saja bandara kita kembangkan tetapi subsidiya kita hilangkan. Paling tidak ada beberapa titik bandara yang di Aceh itu untuk membuka keterisolan

daerah ini daerah-daerah terpencil agar dapat diberikan subsidi. Sehingga akses keluar masuk ke daerah tersebut bisa dilaksanakan dengan baik.

Itu mungkin, Pak, ke Dirjen Udara, mudah-mudahan dapat diakomodir Pak terkait dengan subsidi tadi, Pak. Yang paling penting Gayo Luwes-Banda Aceh, Gayo Luwes-Medan Pak, yang selama ini sebenarnya sudah ada, Pak. Selama ini sudah ada terakomodir kecuali di Tahun 2022 ini, hanya tinggal Gayo Luwes ke Banda Aceh ke Medannya, sementara kita masyarakat Gayo Luwes, justru ke Medan itu lebih penting, Pak. Karena jarak tempuh dari Gayo Luwes ke Medan itu kalau naik darat kita sampai 9 jam dengan jalan yang berkelok-kelok seperti itu.

Kemudian ke Dirjen Laut saya tidak tahu apa yang harus saya tanyakan nih Pak. Tapi ingin saya sampaikan kepada Bapak, dari delapan koma sekian T anggaran di Dirjen Laut ini. Saya melihat Aceh tidak ada yang tersentuh, kecuali ada pembangunan stasiun radio pantai di Susuh dan di Sinabang. Sementara di Aceh juga banyak pelabuhan-pelabuhan yang harus kita benahi Pak, ada pelabuhan Kerung Raya yang kondisinya sampai hari ini masih belum maksimal. Krueng Geukueh di Lhokseumawe dan juga ada beberapa pelabuhan-pelabuhan yang menurut saya perlu kita perhatikan agar Aceh juga bisa berkembang seperti daerah-daerah lain yang ada di Indonesia ini, Pak.

Saya pikir hanya itu Ketua, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

*Wa'alaikumsalam*, terima kasih, Pak. Pak Harvey silakan.

**F – PDIP (HARVEY B. MALAIHOLLO):**

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

**Yang terhormat para Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,  
Dan juga Bapak Dirjen Perhubungan Laut dan Udara beserta jajarannya,**

Saya berbicara mengenai Dapil, dan banyak sekali saya bawa aspirasi, bukan banyak dan artinya yang saya bicarakan adalah aspirasi yang saya terima waktu kemarin saya reses terakhir, Pak.

Yang pertama saya bicara dengan Bapak Dirjen Laut dulu. Pak, terima kasih pertama-tama Bapak, sudah memasukkan di dalam materi pemaparan pelabuhan Sausapor dari Tamerau yang memang keadaannya sudah sangat menyedihkan, Pak. Jadi, apa namanya, tiang-tiangnya sudah retak, bangunannya pun sudah sangat memprihatinkan, apalagi bicara mengenai lampu-lampu dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah salah satu atau satu-satunya pelabuhan yang masih beroperasi di Kabupaten Tamerau, terima kasih sekali lagi.

*Nah*, satu hal yang kemarin saya juga tinjau adalah di Kabupaten Sorong, Pak. Kabupaten Sorong itu ada kawasan ekonomi khusus, pelabuhannya itu belum beroperasi. Mudah-mudahan, Pak Dirjen, mendapat info yang sama dengan yang saya dapat adalah adanya karang di pelabuhan tersebut, sehingga menyulitkan kapal-kapal untuk sandar ke pelabuhan. Padahal pelabuhan itu sangat dibutuhkan di Sorong, karena Kota Sorong, pelabuhan di Kota Sorong itu sudah sangat penuh. Sehingga mungkin bisa dibagi penumpang, kapal-kapal penumpang itu di Sorong lalu kapal-kapal yang memuat apa namanya, *container*, dan lain sebagainya itu bisa di pelabuhan KEK itu, Pak. Itu, itu untuk Pelabuhan Laut atau Perhubungan Laut.

Dan, untuk Perhubungan Udara saya juga mengucapkan terima kasih, karena perpanjangan *runway* di lapangan udara Rendani sudah masuk di dalam materi pemaparan Bapak, pada siang hari ini. Dan, memang mungkin belum sampai ke terminalnya karena saya dengar masih ada permasalahan dengan pembebasan tanah.

*Nah*, satu yang saya bawa nanti akan saya ajukan juga sebagai usulan saya kepada Pak Dirjen. Lapangan udara di Abreso di Manokwari Selatan yang saya terima waktu itu infonya sudah tidak ada masalah dengan pembebasan tanah dan ini lumayan strategis. Karena di situ juga bisa mencakup wilayah-wilayah destinasi wisata dan bisa menjadi salah satu lapangan udara alternatif yang bisa mencakupi beberapa Kabupaten. Yang seperti kita ketahui bersama, 12 Kabupaten di Papua Barat dan satu Kota itu letaknya berjauhan, Pak. Jadi, mohon perhatiannya untuk usulan Bandar Udara Abreso di Kabupaten Manokwari Selatan. Itu saja, terima kasih banyak, makasih Pak Pimpinan.

**F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Ibu Novita, silakan Bu.

**F – P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):**

Makasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati Pimpinan, Anggota, Pak Dirjen Laut, Udara, dan jajaran yang saya hormati, semuanya baik fisik maupun virtual,**

Langsung saja, terima kasih kepada Dirjen Laut, karena saya cerita Dapil saja. Dapil kalau sudah beberapa kali melaksanakan padat karya terutama di kenavigasian dan KSOP. Tetapi, Pak di Cilacap kelihatannya perlu ada perhatian di KSOP Cilacap yang pertama saya sih dulu sudah pernah sampaikan bahwa kantornya juga kurang representatif. Kemudian juga yang kedua perlu adanya pengerukan di pelabuhan Cilacap. Karena kapal yang bersandar itu *nggak* bisa besar, itu saja PR-nya, nanti mungkin Pak Dirjen sudah tahu lah waktu itu saya sampaikan di Cilacap itu, dua, saya mohon untuk KSOP di Kabupaten Cilacap.



Kemudian mengenai pelabuhan apa namanya, TUKS Pak, yang khusus-khusus di Indonesia Pak, yang khusus ya Pak, saya pernah telfon Pak Mugen, komunikasi juga dengan beberapa. Tolong ada evaluasi kepada pelabuhan-pelabuhan yang khusus TUKS itu, kalau ada yang melakukan pelanggaran mohon untuk bisa dievaluasi. Kemudian, kalau ada yang mengajukan surat-surat juga dilihat apakah pelabuhan tersebut sudah melakukan sesuai dengan aturannya gitu. Kadang ada saya mendengar beberapa *Jetty* yang pribadi itu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kemudian, padat karya dimohon untuk bisa lebih gitu, karena 2023 kita banyak bertemu dengan konstituen.

Kemudian, kalau yang Dirjen Udara Pak, pasti Pak, mungkin teman-teman sudah menyampaikan. Tiket Pak, setiap rapat juga pada saat ketemu sama Pak Menteri juga saya selalu menyampaikan tiketnya lah tolong dikendalikan gitu. Karena saya *nggak* ngerti mungkin karena apa armadanya pesawatnya terbatas gitu, sehingga tinggi kemudian BBM-nya avturnya tinggi naik, sehingga bisa naik, tapi mohon ada pengendalian harga, jangan sampai liar. Kemarin saya mendapat informasi turun 50% apa 15% itu benar apa *nggak*? Tetapi harapannya harga ya, itu jangan kemudian naiknya *nggak* beraturan.

Kemudian, kalau di Cilacap ceritanya susah karena apa bandaranya *nggak* beroperasi dengan maksimal, ya. Saya dari Dirjen sebelumnya Pak Novi sudah datang ke sana sih sebetulnya komunikasi cuma Kepala Daerahnya mungkin belum nyambung. Cuman saya mengucapkan terima kasih juga karena usulan masjid sudah jadi tuh walaupun kecil ya, nanti akan ada peresmian masjid, jadi bisa pantes lah di Cilacap kalau ada yang mendarat di sana. Kemudian, ya paling padat karya Pak, saya *nggak* cerita panjang, nanti komunikasi langsung.

Terima kasih Pimpinan,

*Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

*Walaikumsalam*, makasih Bu Novita. Pak Samuel, Pak Sumail, Sumail silakan, Pak Samuel *sorry* Pak, Pak Sumail.

**F – P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):**

Makasih Pimpinan, jadi memang kadang-kadang teman-teman memplesetkan saya Pak Samuel Pak, ya itu kalau saya lahir di ya Ambon lah, kalau di Amerika Michael, Pak. Karena di Indonesia maka Sumail Pak.

**Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,  
Pak Dirjen Perhubungan Laut, Perhubungan Udara dan seluruh jajaran,**

Izin interaktif dulu Pak Ketua, langsung dengan Dirjen Perhubungan Udara ya boleh ya. Pak Dirjen saya ingin tahu tentang yang berwenang mengatur rute sama jadwal penerbangan tuh siapa itu Pak? Apakah AP II,

bukan AP II, Angkasa Pura atau Kementerian Perhubungan Pak, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara. Saya ingin tahu dulu Pak, siapa yang berikan kewenangan, izin lah.

**Pit. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Ir. NUR ISNIN ISTIARTONO, M.Si.):**

Bisa langsung, Pak?

Terima kasih, Pak. Jadi, di Indonesia sudah ada tim staf koordinator Pak, untuk bandara-bandara besar. Jadi, sudah ada sekitar 40 bandara yang besar Soekarno Hatta, yang itu adalah staf koordinator independen Pak. Itu dari perwakilan bandara, perwakilan daripada *Air Navigation*, kemudian juga daripada asosiasi *airline*. Tapi, yang kecil-kecil masih bersama-sama antara Airnav dengan bandara setempat. Tapi, yang mayoritas bandara yang hub-hub semua yang 40-an itu adalah ada slot koordinator nasional Bapak, terima kasih.

**F – P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):**

Baik, jadi bukan di bawah langsung Kementerian Perhubungan Pak ya?

**Pit. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Ir. NUR ISNIN ISTIARTONO, M.Si.):**

Bukan Pak, independen.

**F – P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):**

Baik, kenapa ini saya ceritakan? Dapil saya Banyuwangi Pak. Kadang kita bertanya-tanya, pesawat yang berangkat Pak, hari ini semenjak covid itu hanya ada di pagi hari. Jamnya sama lagi Pak, jam 6 semuanya, satu Citilink satu Batik. Jadi di udara, seolah-olah kita *anu* Pak, balapan Pak gitu. *Nah*, kenapa ini tidak dibedakan jamnya? Misalnya 1 pagi atau 1 siang. Sehingga juga memberikan alternatif pilihan bagi pengguna jasa apa namanya, angkutan udara untuk lebih fleksibel memilih waktu, itu Pak. Saya itu yang menjadi tanda tanya, secara kompetisi juga kalau menurut hemat saya juga tidak sehat.

Yang kedua tentang saya ingin menyoal tentang arsitektur bangunan bandara-bandara yang ada di hampir seluruh Indonesia. Dulu kita bangga dengan punya bandara Soekarno-Hatta Pak, dengan arsitektur yang ke-Indonesiaan lah. Mengadopsi kearifan lokal, di situ ada apa namanya ornamen-ornamen Bali sebagai pintu gerbang masuk ke Indonesia. Akan tetapi terakhir seolah-olah bahwa itu ditinggalkan ya. Jadi, langsung mengadopsi apa namanya, konsep ya kemodernan lah. Padahal dalam rangka untuk mendorong tujuan wisata.

Contoh Banyuwangi Pak, Banyuwangi hari ini sedang bersaing dengan 20 nominator arsitektur bandara di seluruh belahan dunia yang akan mendapatkan *reward* kurang lebih Rp14 Miliar lah, tentu ini menjadi kebanggaan bagi kita. *Nah*, kenapa tidak bandara-bandara lain yang bakal kita

bangun tadi ada beberapa lokasi, kita coba dorong Pak. Kita panggil arsitektur-arsitektur lokal sehingga bahwa begitu datang ke Indonesia, memang inilah kita. Tentu juga dengan mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan. *Nah*, bandara-bandara sedemikian juga seyogyanya juga dapat insentif dari kita dan Kementerian Perhubungan. Contoh misalnya pengembangannya, saya lihat di sini tidak ada Pak, pengembangan Bandara Banyuwangi, Belimbing Sari padahal itu sudah ditetapkan sebagai bandara internasional.

Benar juga apa yang disampaikan oleh Bu Restu tadi bahwa ada kadang bandara-bandara berdekatan, Jember dengan Banyuwangi jarak tempuhnya kalau kita lewat darat 3 jam lah kalau tidak macet, Pak. Nanti kalau ada JLS itu, Jalur Lingkar Selatan itu sudah terbangun paling 2 jam ini kan juga tidak efektif sebenarnya ya itu bisa terhimpun di satu titik di Jember atau kemudian di Banyuwangi. Kalau ini terjadi di beberapa tempat nanti maka ada bandara yang bakal dikalahkan Pak. Terlepas Banyuwangi, sebenarnya juga bakal dijadikan bandara penyangga ketika ada *event-event* internasional yang ada di Bali contoh G20 misalkan. Itu yang kedua.

Terus tadi juga disampaikan tentang adanya padat karya-padat karya, padahal di tempat saya itu ada bandaranya. Kok saya belum pernah diberi tahu atau di apa diajak komunikasi lah misalnya ada kegiatan di sana sehingga masyarakat yang kehilangan pekerjaan bisa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang non-teknis. Itu saya kira Pak Dirjen Perhubungan.

Berikutnya, kepada Pak Dirjen Perhubungan Laut. *Ticketing online* Pak, saya sudah juga bicara di beberapa kesempatan kan. Saya melihat menimbulkan semakin semrawutnya tampilan-tampilan di pelabuhan. Saya tinggal di Palembang, jadi sebulan sekali juga lewat darat ke Palembang kan Pak, banyak gerai-gerai di situ ada BRI link lah macam-macam, sama juga yang ada di Ketapang. *Nah*, kenapa tidak dicarikan apa layanan yang sekaligus terpadu kan, tidak menimbulkan kemacetan-kemacetan baru atau tidak eloknya pemandangan lah kalau kita masuk ke pelabuhan. Ini tolong di *anu* Pak, di apa namanya, dicarikan jalan keluar.

Yang kedua, kaitannya dengan jalur eksekutif yang ada di Banten-Bakauheni, Merak-Bakauheni maksud saya, Merak-Bakaheuni. Itu sebenarnya jalur yang luar biasa bagus, peminatnya juga banyak, kenapa tidak dicoba dibuka juga untuk swasta sehingga tidak menjadi monopoli daripada ASDP. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan atau aspirasi yang disampaikan kepada saya Pak, mohon juga dibuka kasih kesempatan kami swasta untuk terlibat di sana, seperti itu.

Berikutnya, kaitannya dengan yang di Dapil, dua tahun yang lalu Pak Direktur Perhubungan Laut, Pak Subagyo, juga sudah datang berkunjung ke sana ada Bupati, kaitannya dengan pengembangan dermaga Kalbut. Saya ingin mengingatkan kembali Pak Subagyo, karena itu memang ditunggu oleh Bupati oleh masyarakat setempat bahwa banyak kapal-kapal besar itu berlabuh di tengah laut Pak. Kalau di kita bisa tarik sehingga bisa memacu dan memicu pertumbuhan ekonomi yang ada di sana, seperti itu. Dan, banyak apa namanya, kegiatan-kegiatan ekonomi yang dari kepulauan-kepulauan yang

tersebar di sekitaran pulau Madura itu beraktivitas secara ekonomi. Contoh misalnya sapi, karena dermaganya Pak, tidak memadai, kadang-kadang sapi itu dilempar di laut Pak, seringkali itu.

*Nah*, saya coba bicara juga dengan Bagian Perencanaan tempo hari, tinggal RIP-nya Pak, katanya Pak, saya juga sudah bicara juga dengan Pak Menteri kan. Ketika saya pulang ke Palembang ya Pak Mail, nanti kita akan coba apa namanya, apa namanya dalam kembali lah. Mohon ini menjadi atensi Pak, karena juga kami sudah lakukan kunjungan secara bersama-sama datang ke sana.

Yang berikutnya kaitan dengan saya mendengar minggu lalu ada beberapa perputaran di KSOP-KSOP, Pak Kepala KSOP. Saran saya mungkin untuk wilayah-wilayah tertentu, tempat-tempat tertentu Pak, kalau di situ misalnya ada pangkalan-pangkalan militer. Seyogyanya mungkin dengan, bukan kita mau mendikotomi bahwa harus sipil dan militer. Sehingga koordinasi di antara KSOP dengan entitas atau lembaga-lembaga terkait itu berjalan dengan baik.

Kira-kira itu Pimpinan, Bapak-Ibu sekalian.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Pak Willem Wandik.

**F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

Baik.

**Pak Ketua, dan  
Pak Dirjen Perhubungan Udara, Pak Dirjen Perhubungan Laut serta  
seluruh jajaran,  
Dan juga rekan-rekan Anggota Komisi V,**

Dari kami akan coba respons sedikit terkait evaluasi pelaksanaan APBN 2022. Pertama, baik Dirjen Perhubungan Laut maupun Udara, Pagu Anggaran Perhubungan Udara maupun Laut, yang bersumber dari pinjaman hibah luar negeri memang tergolong kecil. Tapi ini dibebani, kita dibebani dengan biaya cicilan bunganya. Maka perlu perhatikan daya serapnya kalau bisa, bisa mencapai 1%, karena hingga tidak itu berdampak pada kerugian masyarakat.

Yang berikut pada padat karya, baik Dirjen Perhubungan Laut maupun Udara. Tentu kami harap perlu perhatikan baik karena di tengah-tengah warga kita sedang mengalami kelesuan. Semoga diharapkan dengan padat karya ini bisa memperkuat daya jangkauan warga, di mana warga dihadapkan pada situasi yang memang tidak menguntungkan sebagai dampak dari pandemi covid dan juga krisis energi dan juga pangan. Sebagai dampak dari konflik

Russia versus Ukraina dan juga musim kemarau panjang di Eropa, karena ada juga memberikan dampak pada kita di Indonesia.

Yang berikut untuk Dirjen Perhubungan Laut, selama tahun, ya baik Dirjen Perhubungan Laut maupun Udara. Di tengah banyaknya isu mengenai transportasi udara maupun laut, termasuk juga seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Dengan melonjaknya harga tiket yang begitu luar biasa, perlu juga kami mengharapkan pengawasan terhadap maskapai maupun juga perkapalan serta pelayanannya dan untuk itu perlu dilakukan kajian. Jangan sampai ini ada unsur apa, ada permainan di dalam baik dari pihak maskapai maupun juga perusahaan perkapalan.

Dan, untuk Dirjen Perhubungan Udara, tentunya Pak Dirjen sudah mengetahui bahwa kami di Papua itu sangat tergantung pada transportasi udara, selain darat. Oleh karena itu, kami minta kepada Dirjen Perhubungan Udara agar benar-benar memiliki pengawasan yang baik dan ketat terhadap penyelenggaraan kegiatan transportasi udara di wilayah Papua. Sering terjadi insiden di sana, karena kami di Papua itu bukan saja antar Kabupaten, tapi dari Kabupaten mau ke Kecamatan, ke Desa pun pakai pesawat. Di sana banyak bandara-bandara kecil, tapi sejauh hampir 10 tahun saya perhatikan kadang sampai hari ini masih luput dari perhatian kita. Oleh karena itu, kalau memang ada, ke depan ini kalau ada usulan dari kami kiranya bisa dapat diperhatikan.

Dan, juga kemarin saya baru terima audiensi dari teman-teman penyelenggara di daerah, khususnya Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Provinsi NTT. Di mana ternyata Bandara Satar Tacik Kabupaten Manggarai itu sudah tidak beroperasi selama kurang lebih tiga bulan. Pak Dirjen, tentunya situasi ini juga sangat mempengaruhi situasi perputaran ekonomi di sana. Karena itu kiranya saya kira memberikan respon.

Dan, yang berikut Pak Dirjen Udara, kondisi sisi udara bandara di Kota Sorong membutuhkan dukungan program perbaikan *runway* dan pengendalian muka air tanah yang hanya 60 centimeter di bawah permukaan *runway*. Sedangkan permukaan *runway* bandara elevasi hanya 1,7 Meter dari permukaan air laut. Dan, beberapa hari lalu terjadi *water fonding* pada *runway* sepanjang 650 Meter sebagai akibat banjir yang telah melanda di Kota Sorong. Sehingga, terdapat beberapa kerusakan pada permukaan *runway*, sementara itu terjadi peningkatan pengguna jasa yang sangat signifikan menuju, ke dan menuju tempat lain, baik perjalanan wisata maupun juga karena pengaruh peningkatan kegiatan perekonomian. Dan juga Pak Dirjen, Bandara Deo Sorong ini lebih diperhatikan karena sebagai pintu masuknya Provinsi Papua Barat maupun juga Papua dan juga gerbang destinasi wisata di Raja Ampat.

Dan, ya kemudian untuk Dirjen Perhubungan Laut, di beberapa wilayah Papua sangat membutuhkan sentuhan infrastruktur pelabuhan. Ini jangan hanya fokus di pelabuhan besar saja, tapi juga perbaikan terhadap pelabuhan pengumpan yang sudah berjalan selama ini di Papua. Jika ada usulan pelabuhan, tolong nanti diperhatikan. Selain itu perlu diawasi betul program tol laut, di wilayah Papua kami perlu mendapatkan laporan dari Dirjen Laut terkait dengan kegiatan tol laut Papua. Karena ini adalah diskresi Presiden, baik tol

laut maupun tol udara, tapi sejauh ini kami belum mendapatkan progres. Karena itu, kiranya bisa menjadi perhatian supaya kami bisa koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan juga untuk memanfaatkan program tol laut maupun tol udara.

Pak Ketua untuk sementara itu dulu, terkait dengan usulan nanti akan disampaikan pada kesempatan lain, besok atau lusa. Sekian, terima kasih.

**F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Makasih, Pak Muhammad Fauzi. Silakan.

**F – P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):**

***Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,***  
**Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua,**

**Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi V,**  
**Yang saya hormati teman-teman Komisi V,**  
**Yang saya hormati Bapak Dirjen Kementerian Perhubungan Laut dan Udara beserta jajarannya,**

Pertama-tama saya ingin sampaikan apresiasi terhadap dua Dirjen ini terutama dalam penyerapan anggaran, rata-rata di atas targetnya Pak, ya. Kemudian untuk Perhubungan, tadi ada beberapa teman-teman yang menyinggung mengenai tiket Pak, ya. Ya memang kalau saya ingin melihat dari sisi setelah kenaikan, kira-kira apa yang didapat oleh penumpang Pak? Karena *airport tax* sudah naik Pak, tiket juga sudah naik Pak. Seharusnya pelayanan di bandara harus lebih maksimal, covid sudah tidak lagi, harusnya dijadikan alasan yang mendasar, harus pelan-pelan harus dimulai, Pak.

*Delay* juga menjadi problematika sehari-hari yang kita hadapi di tengah-tengah kita Pak. Saya jujur Pak, ada tiga bulan yang lalu, saya ke tempatnya Bu Cen ini ke Batam. Itu saya tanya sama beliau, Bu Cen memang di Batam kayak begini? Oh dia bilang itu sehari-hari *delay* pesawat Pak. Tapi yang paling dilematis Pak, saya *delay* hampir enam jam Pak. Yang dilematisnya lagi, mungkin ini juga perlu dipublikasikan Pak, harusnya kan ada kompensasi yang didapat oleh penumpang Pak, ini banyak penumpang *nggak* paham Pak.

*Nah*, setelah saya telepon maskapai yang saya pakai Pak, ya saya sebut saja lah Citilink, baru oh ternyata ada Anggota DPR gitu ya direspon Pak, Komisi V lagi. Nah, setelah direspon baru diberikan kuesioner apa yang mau didapat. Ini kan lucu gitu Pak, yang harusnya kewajiban kompensasi didapat. Tetapi kalau tidak ada yang protes ya, tidak keluar itu kompensasinya. Nah, ini perlu juga dipublikasikan kepada masyarakat kompensasi yang didapat kalau seandainya terjadi *delay* Pak. Mungkin sampai naik pesawat apa, setelah enam jam itu, kalau tidak ada yang komplain ya tidak dapat apa-apa Pak. Nah, yang lucunya lagi *delay* nya itu bertahap, 1 jam, 2 jam sampai 6 jam terakhir. Setelah itu saya telpon Pak Ibu Cen, Bu Cen ini bagaimana di Batam begini, oh itu sehari-hari katanya. *Nah*, ini kan masyarakat dirugikan Pak.

*Nah*, ternyata setelah saya cari-cari informasi, banyak ternyata Pak, ini juga perlu ditertibkan. Jadi, maskapai penerbangan ini hanya orientasinya bagaimana mengambil rute sebanyak-banyaknya, sementara jumlah pesawat minim, Pak. Ini yang harus ditertibkan, harusnya harus disesuaikan, ada keseimbangan, antara jumlah pesawat dengan rute gitu. Jadi, mudah-mudahan pengalaman saya tidak dialami oleh teman-teman Anggota Dewan yang lain lah, gitu cukup jenuh enam jam di bandara, Pak. Tapi, setelah itu luar biasa memang, kita keluar dari pintu saja di Batam sudah wah *service* nya luar biasa setelah itu Pak, ini kan lucu kalau kayak begini, gitu. Harusnya kan *service* itu ada standarisasinya, jangan kalau ada masalah baru ditingkatkan, gitu.

Kemudian, saya masih coba menagih lagi Pak, ya mengenai rute Palu-Rampi Pak, gitu. Kalau bisa dibuka kembali Pak, karena sampai saat ini belum ada rute itu, dulu pernah ada Pak, ya.

Selanjutnya, tadi kalau *nggak* salah Ibu Sarce menyinggung masalah Bandara Toraja. Saya coba menghubungkan dengan hasil dialog saya dengan teman-teman BMKG Makassar, Pak. Bandara Toraja adalah salah satu bandara yang cuacanya belum terpantau Pak, prediksi cuacanya, Pak. Karena memang alatnya tidak belum ada dan tidak, walaupun yang terdekat tidak sampai ke sana Pak. *Nah*, ini bagaimana tingkat keselamatan kalau modelnya begini Pak? Jadi ukuran pesawat itu mendarat atau terbang ini apa yang menjadi tolak ukurnya, Pak? Itu dari informasi yang saya dapat dari teman-teman BMKG Pak ya. Karena itu masuk juga Dapil saya bersama Ibu Sarce tadi.

Ya, saya sangat setuju juga apa yang disampaikan Pak Bahar ya, eh Pak Bakri, Pak Bahar lagi. Pak Bakri, ya kalau memang bisa dikoordinasikan, kalau ada rotasi atau perputaran-perputaran teman-teman di bandara, tolong juga kami diinformasikan, seperti saya pernah mengusulkan sama Bapak itu, ya minta tolong, Pak.

Yang terakhir juga saya ingin belum ada rasa puas saya Pak, atau saya belum pernah dapat jawaban Pak, ya walaupun tertulis gitu Pak, ya. Saya ingin minta keadilan saja Pak, kami kan dari Sulawesi Selatan Pak, selalu kalau di terminal 3 parkirnya jauh sekali Pak, selalu itu, parkirnya Pak, kalau sudah masuk terminal 3, Garuda atau Citilink pasti kita itu paling ujung mau berangkat maupun mau pulang. Ini apa kriterianya parkir gitu Pak, paling tidak digilir lah minggu ini Sulawesi Selatan agak di depan, ini selalu jauh-jauh sekali gitu.

Pak Hamka, mana Pak Hamka? Bagaimana masih kuat Pak Hamka? Oh kuat, gitu. Saya juga minta penjelasan itu Pak, tolong lah diperhatikan juga Pak, selalu Pak, jauh Pak, gitu.

Kemudian, itu cukup ya untuk udara, untuk laut Pak. Penyerapan Bapak tadi saya sampaikan juga cukup memuaskan, Pak. Tapi ada satu sektor yang menurut saya apa penyerapannya masih, masih apa masih sangat ini Pak, ya, perlu ditingkatkan Pak, ya, terutama tingkat penyerapan tenaga kerja, apa

masih rendah Pak, ya, masih 18,96% gitu. *Nah*, ini perlu ditingkatkan gitu Pak ke depannya.

Berikutnya pelabuhan Munte Pak. Saya juga minta tolong ke Bapak kalau bisa pelabuhan Munte Pak, punya Syahbandar sendiri lah Pak. Karena *alhamdulillah* sudah beroperasi, beroperasi di sana walaupun masih sangat terbatas Pak, ya karena ada keterbatasan-keterbatasan. Syahbandarnya masih dipegang oleh Syahbandar yang ada di Luwu Timur Pak. Kalau memang bisa dimandirikan ya, menjadi ada Syahbandar tersendiri untuk pelabuhan Munte Pak.

Kemudian, saya memperhatikan Pak, ya, ada beberapa kejadian yang tidak kita inginkan, tenggelamnya beberapa kapal Pak, ya baik di Sulawesi Selatan maupun di tempat-tempat lain. Salah satunya disebabkan karena berubahnya keperuntukan yang tadinya barang menjadi orang. *Nah*, saya lihat, ya minta maaf Pak dari Kementerian Perhubungan ini belum ada tindakan tegas Pak, sehingga ini selalu berulang-ulang kembali Pak. Perlu lah dibuat efek jera kepada pelaku-pelaku Pak, bahkan kalau bisa kalau mau di-*blacklist* Pak, saya pernah teman-teman mengusulkan juga sama misal di PUPR yang di-*blacklist* itu bukan PT-nya, tapi orangnya.

Jadi ini bicara nyawa masalahnya, Pak gitu, *nggak* harus kompromi *nggak* perlu main-main kalau bicara nyawa ini, selalu gitu. Di selat Makassar kemarin kejadian juga kan sebenarnya kapal barang Pak, berubah status, bukan berubah status, dirubah, atau dirubah atau digunakan untuk bawa orang. Dan, kejadian-kejadian ini cukup banyak di tempat lain Pak.

Kemudian, saya juga ingin mengetahui ya, baik di udara maupun di laut. Kebetulan saya ini pecinta hewan Pak, jadi sangat longgar, saya banyak sekali, hewan-hewan yang harusnya dilindungi Pak, keluar masuk dengan sangat mudah Pak, saya agak prihatin gitu, sangat mudah. *Nah*, saya *nggak* tahu ini apa ini ada di apa Angkasa Pura atau di kalau untuk bandara ya atau di mana, ini walaupun memang ada surat karantina. Memang karantina ini juga jadi problematik Pak, karena hewan itu harus masuk dulu karantina. *Nah*, kita sebagai pecinta hewan Pak, siapa yang menjamin hewan kita tidak ditukar gitu. Karena hewan itu misalkan burung Pak, ya, burung itu kan sama burungnya harganya beda Pak, bagaimana jaminan burung itu tidak ada diganti. Sehingga banyak sekali orang dapat surat karantina tanpa harus masukkan hewannya Pak, gitu. *Nah*, ini pelan-pelan lah harus kita rapikan Pak, sehingga ke depan ini kita juga mempunyai partisipasi terhadap negara terutama partisipasi kita kepada hewan-hewan yang dilindungi Pak.

Yang terakhir, saya sama dengan teman-teman. Kalau memang ada dan ya diusahakan Pak, 2024 sebentar lagi ini Pak. Artinya kalau memang ada program-program yang sifatnya padat karya tolong kami paling tidak dikoordinasikan Pak, baik di udara maupun di laut. Saya pikir itu Pak Pimpinan, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*



**KETUA RAPAT:**

Ya, saya tinggal, tinggal satu ya Pak Mesakh, ya, supaya kita bisa selesai jam 2 lah paling *nggak* 2.15 paling. Silakan Mesakh Mirin.

**F – PAN (MESAKH MIRIN, SKM):**

Terima kasih, Pak Ketua.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua serta seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,  
Yang terhormat Pak Dirjen Perhubungan Udara dan Laut serta jajarannya,**

Terima kasih, saya langsung saja ini bagian dari aspirasi masyarakat kita terutama di Papua, singkat saja. Bahwasannya Pak, lebih khusus pada Dirjen Perhubungan Udara. Langsung saja saya dari Papua di bagian pegunungan, bahwa kami di sana kan semua lapangan itu kan semua perintis Pak. Mungkin subsidi ini juga harus diperbanyak, saya dari Yahukimo Pak. Dari Yahukimo itu terima kasih Pak Wakil Ketua, Pak (suara kurang jelas) Kemarin sudah dapat kita sedikit untuk di Sobhan itu.

Tapi kami minta lagi untuk di Koropun, karena Anggaran APBN Tahun 2019 itu sampai sekarang mangkrak Pak, karena itu sumbernya dari APBN sehingga itu juga yang saya minta melalui Pimpinan mohon diperhatikan dari untuk Koropun dan Sobhan. Karena di Yahukimo itu sekitar 51 Kecamatan di sana transportasi semua melalui udara, lebih khususnya Cesna. Walaupun armadanya sedikit tapi masyarakat kita dan marketing besar di sana, sehingga memang persaingan-persaingan ini membuat masyarakat kita juga kadang kewalahan. Sehingga, subsidi-subsidi yang selama ini dikasih, mungkin memperbanyak ya mungkin itu yang saya bisa dapat sampaikan, itu yang pertama.

Yang kedua, sama halnya juga dengan teman-teman terdahulu, bahwasannya Menteri, eh, bagian Dirjen Perhubungan maupun laut, kami sedikit lagi 2024. Sehingga tolong mohon arahan petunjuk yang apa yang disampaikan teman-teman tolong perhatikan kami. Supaya bisa untuk masyarakat untuk 2024 ke depan, terima kasih.

Mungkin itu saja Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*  
Shalom.

**KETUA RAPAT:**

Shalom. Kalau Mesakh ngomong begitu manis sekali, mantap. Oke dari Aceh kita ke, eh, dari Papua kita ke Aceh. Langsung Pak Ruslan, sama juga.

**F – PKB (RUSLAN M. DAUD):**

Kalau Aceh dengan Papua sudah aman, negara kita ini aman semuanya. Terima kasih Ketua.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati Pimpinan,  
Yang saya banggakan dan saya hormati Bapak Dirjen, Dirjen Udara, Dirjen Laut dan seluruh para jajaran,  
Yang saya banggakan seluruh para Kabalai yang ada khususnya di Aceh,**

Saya langsung Pak Dirjen, selepas saya lihat tadi paparan di Pak Dirjen Udara. Memang Bandara Malikusalleh itu masuk, masuk dalam kategori nama disebut. Tapi anggarannya Pak Ketua, ini belum saya tahu, belum saya tahu. Nah, perlu saya gambarkan Pak Dirjen, Bandara Malikusalleh itu adalah pernah dikunjungi oleh Komisi V secara khusus pada tanggal 20 Desember Tahun 2021 yang lalu. *Nah*, hasilnya adalah merekomendasikan, jadi bandara ini sangat layak untuk diperjuangkan seperti bandara di tempat yang lain. Sebab bandara ini adalah yang pertama untuk menunjang ekonomi khusus yang ada di Lhokseumawe Pak Dirjen. Nah, di situ perlu angka yang sangat luar biasa Pak Dirjen. Di Aceh, bandara yang memang, saat ini memang terpenuhi yaitu bandara internasional yang ada di Banda Aceh. *Nah*, kalau di sisi pesisir, letak Bandara Malikusalleh ini sangat luar biasa strategisnya, diapit oleh beberapa Kabupaten dengan penduduk yang padat di Provinsi Aceh Pak Dirjen. Maka saya pikir ini perlu perhatian Pak Dirjen secara khusus Bandara Malikusalleh ini sebelum berakhirnya Bapak Presiden kita, kalau bisa bandara ini harus terbangun sempurna seperti bandara di tempat yang lain.

*Nah*, yang dibutuhkan di situ adalah pelebaran *runway* dan juga bangunan dan juga untuk pematangan lahan. Jadi, mohon Pak Dirjen sekali lagi, kalau memang untuk Bandara Malikusalleh itu tolong diprioritaskan untuk Anggaran Tahun 2023 ini. Itu Pak Dirjen, ya Pak Dirjen ya, nanti saya ingatkan kembali lagi mungkin saya serahkan nanti map, supaya teringat Pak Dirjen. Jangan kalau sekarang kita kan ngomong kayak gini, tetapi dengan nanti tulisan dengan surat mungkin lebih afdol ya. *Nah*, itu saja mungkin Pak Dirjen, terima kasih Pak Dirjen.

*Nah*, yang kedua adalah Dirjen Laut, apa kabar Pak Dirjen, sehat? Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak (suara kurang jelas) tadi, ini angkanya kan delapan lebih ya? Tapi kok di Aceh nih *nggak* muncul gituloh. Padahal Aceh kan bagian daripada Indonesia juga Pak Dirjen ini, berilah keadilan untuk masyarakat Aceh supaya masyarakat Aceh pun jangan memberontak lagi Pak Dirjen. Ya mohon perhatian Pak Dirjen Laut, sebab gini Pak Dirjen. Aceh ini adalah seluruh kebutuhan masyarakat ini dipasok dari Medan Pak Dirjen. Kalau memang bahannya dibawa dengan darat tentu *cost*-nya sangat tinggi Pak Dirjen. Maka perlu gagasan Pak Presiden, tol laut itu perlu wujud di Provinsi Aceh. Apakah ini pelabuhan Krueng Geukueh ke Belawan, Belawan ke Malahayati dan juga Belawan ke Calang? Itu bisa memangkas harga ataupun *cost* yang memang itu bahan seluruh itu, bahan

pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh bisa dilalui lewat laut, kalau memang lewat laut otomatis *cost* itu bisa rendah. Itu Pak Dirjen, mohon keadilan saja Pak Dirjen. Jadi, jangan kami adalah masyarakat Aceh menjadi penonton yang Rp9 Triliun itu Pak Dirjen, ya Pak Dirjen ya?

Jadi, itu saja saya pikir, terima kasih atas apa, atas pengertian Pak Dirjen Laut dan Udara. Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Ruslan. Ini ada namanya Bu Eem, Eem ya? Ada *nggak*? Oh ada? Silakan Bu Eem, jangan panjang-panjang, Eem aja.

**F – PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, M.M.):**

Siap, tidak panjang-panjang Pak Ketua.

**Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh Anggota dan mitra kerja Komisi V,  
Dirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perhubungan Laut beserta jajaran yang saya hormati dan saya banggakan,**

Kalau di laut dan di udara itu kan tidak semua kemudian kami yang ada di Dapil ini, tidak semua yang Dapil kita ada udaranya atau bahkan mungkin ada yang di laut tapi ada yang udara, tapi tidak ada lautnya, seperti itu. Saya berharap Pak Dirjen beserta jajaran kalau bisa meng-*exercise* Pak, untuk kemudian bisa disinergikan dengan program-program yang bisa dibawa ke Dapil, seperti itu. Oke, tadi Bapak menyampaikan ada padat karya. *Nah*, misalkan daerah yang tidak ada bandaranya itu kan tidak bisa kemudian bersinergi, percuma juga kalau kemudian ada padat karya tetapi kemudian tidak bisa bersinergi dengan kita, seperti itu.

Saya berharap, Pak Dirjen tolong, ada kegiatan-kegiatan yang kemudian bisa disinergikan dengan kita. Sehingga, bahwa secara yuridis ya secara berdasarkan keputusan tatib di DPR ini bahwa Kementerian Perhubungan itu adalah mitranya Komisi V itu, itu benar-benar bisa diwujudkan, bisa dimanifestasikan dalam kerja-kerja kita juga gitu kan, tidak hanya kemudian kita dijadiin stempel saja. Saya berharap mohon ada, saya kira gampang kok Pak, tidak perlu ribet, paket *meeting* pasti di setiap unit itu ada gitu, tinggal dibikin aja gitu, kenapa tidak gitu kan. Dan, walaupun misalkan di daerah saya memang tidak ada bandara udara, tetapi bahwa penumpang-penumpang yang menggunakan udara itu ada banyak seperti itu, begitu juga di tempat-tempat lain, seperti itu.

Jadi, tolong apa sedikitlah apa mohon mengerti gituloh, mohon pengertiannya, jangan kemudian kami marah dulu kami ini dulu dan lain sebagainya baru kemudian dibikinkan. Jangan kemudian, kan sudah cukup di darat, jangan seperti itu gitu. Kementerian Perhubungan tuh lumayan banyak

itu anggarannya gitu kan, yang Kementerian Desa saja bisa menyapa seluruh Dapil dengan apa, desa wisatanya atau apalah gitu kan Bumdes gitu. Masa dari Kementerian Perhubungan yang udara yang laut, tidak ada yang bisa disinergikan dengan kita, apalagi besok kita kan menghadapi Pemilu 2024. Jadi, untuk di 2023 tolong di *exercise* ada kegiatan yang bisa dilakukan di Dapil kami baik di Dirjen Udara maupun di Dirjen Laut. Itu saja, terima kasih, eh satu lagi.

Saya pernah berkunjung *menganterin* orang kemana kepulauan Madura, kepulauan Madura. Itu terus kemudian ketemu para tokoh di sana, mereka meminta agar apa sih bukan pelabuhan, apa namanya dermaga ya atau pelabuhan sih? Ya dermaga. *Nah*, di situ ada dermaga minta mereka agar direvitalisasi, Karena apa? Di situ masih kayu Pak, jadi tolong itu daerah-daerah kepulauan yang memang tidak pernah tersentuh oleh pembangunan, ya seperti. Walaupun mungkin ini bukan Dapil saya, tetapi karena kita kemarin ke sana, terus kemudian mereka menyampaikan permohonan itu dan saya sebagai bukti bahwa saya mengakomodir aspirasi dari masyarakat ya saya sampaikan. Tadinya mau saya titipkan Pak Syafi, tapi Pak Syafinya tidak ada hadir gitu kan, seperti itu. Itu saja Pak, terima kasih.

*Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq.  
Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Ya terima kasih, Bu Eem, Bu Eem ini masih trauma-trauma yang lama jadi, ya. Saya kira sudah sebenarnya masalah program sudah harusnya tuntas dengan perhubungan ya. Jadi, cuma ini trauma lama. Lanjut setelah Bu Eem, Pak Jhonni Allen. Masih Pak Jhonni masih? Pas ya? Pak Hamka? Ya Pak Hamka silakan.

#### **F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, M.S.):**

Baik.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,  
Pak Dirjen Udara, Dirjen Laut dan seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan ini,**

Hari ini kita membahas mengenai anggaran ya Pak, ya. Tapi namun demikian saya ingin sedikit meminta apa namanya ya, tanggapan dari Bapak-Bapak semuanya terhadap dana alokasi khusus di Perhubungan. Walaupun bukan duitnya dari Bapak, itu yang saya tahu. Maksud saya adalah hampir semua Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dalam, dalam Krisnanya itu mengusulkan ada dari sektor perhubungan. Yang ingin saya dapat informasi dari Bapak, apakah itu dari laut udara. Apakah di bidang Bapak itu ada yang mengusulkan DAK? Kalau ada, bagaimana mekanisme Bapak di dalam

memberikan suatu *assesment*. Karena setahu saya bahwa Bapak tidak berhak, tidak punya kewajiban di dalam mengalokasikan DAK kecuali dari Bappenas dengan Kementerian Keuangan. Tetapi *assesment* terhadap pengalokasian itu pertimbangannya dari Bapak, itu yang pasti.

Kenapa saya ingin mendengarkan itu, agar supaya dalam pembahasan rapat-rapat dana alokasi khusus nanti, *Insyah Allah* minggu depan di Badan Anggaran. Tentu harus ada keterkaitan-keterkaitan terhadap target-target kita secara nasional, pasti ada kaitannya, apakah itu RPJM Bapak dan seterusnya. *Nah*, itu itu yang ingin saya dalam sedikit, saya berharap kalau tidak bisa dijawab pada hari ini nggak apa-apa, saya minta penjelasan tertulis juga terima kasih. Tapi, kalau bisa dalam waktu sesingkat-singkatnya, agar supaya kita bisa sinkronisasi bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota menginginkan juga penganggaran untuk daerahnya, tentu Tupoksinya juga adalah Bapak sekalian, itu yang pertama.

Yang kedua, saya ke Pak Dirjen Laut, Pak. Ada dermaga yang memerlukan perhatian khusus Pak, di Kabupaten Selayar Pak Dirjen. Ada beberapa kerusakan akibat gempa bumi kemarin di NTT ya NTB ya. *Nah* bandarannya itu, eh bandara *sorry*. Dermaganya itu Pelabuhan Bonerate Pak, Kepulauan Selayar. Mohon barangkali bisa dipikirkan ya, kalau bisa dibantu silakan, kalau menyusahkan *space* anggaran kita juga tidak masalah ya. Tetapi saya berharap bisa dipikirkan ya, karena ini terkait bencana alam. Karena kalau kita tidak perhatikan itu, bisa berakibat lain kalau tidak dibantu.

Saya kira dari udara, saya kira terima kasih Pak Dirjen, Plt Dirjen, semoga semua bisa berjalan dengan baik. Saya juga punya keyakinan bahwa kondisi sekarang ini tentu belum bisa kita melihat secara normal. Orang berbicara mengenai harga tiket, ya tentu yang harus dipertahankan adalah batas atas dan batas bawah itu. Apapun itu karena rumusan itu sudah ada di dalam Keputusan Menteri. Belum ada kewajiban-kewajiban kita secara khusus untuk menurunkan atau menaikkan harga tiket itu. Walaupun di Kabupaten Selayar itu Pak, sampai sekarang karena sepi penerbangan, semua *off* penerbangan di sana, itu bisa dipahami, karena masih ada jalur laut, masih ada jalur darat yang bisa dilalui.

Saya kira itu saja Pimpinan yang ingin saya sampaikan, sebentar ini saya akan berikan Pak Dirjen Laut. Kalau memungkinkan anggarannya disilakan, tapi kalau memang agak sulit tolong dipikirkan kembali dengan baik. Itu saya kira

**F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Interupsi Pak, interupsi Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ya, silakan.

**F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Pak Hamka kok sopan sekali hari ini? Terima kasih Pak Hamka.

**F – P. DEMOKRAT (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):**

Pimpinan, saya lupa sedikit, sedikit saja sebentar.

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, M.S.):**

Hah? Ini Pak Ketua ini. Tadi sudah keras di Badan Anggaran Pak. Ya jadi ini agak lembut di sini karena sudah ada bayangan di sana bahwa akan ada tanda-tanda kehidupan yang baik di Perhubungan, Pak.

**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Kata Pak Hamka tadi sama saya, kalau memang keras lagi ku *nggak* bisa katanya.

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, M.S.):**

Saya kira itu, Pimpinan, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir paling terakhir lagi, nanti akan kita koordinasikan semua aspirasi Anggota yang telah kita sepakati bersama ke depan. Kita tidak usah bicara di sini, nanti diadakan tim khusus untuk mengakselerasikan semua, apa namanya, kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan kemampuan yang ada. Terima kasih.

*Wabillahitaufiq Walhidayah.  
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**F – P. DEMOKRAT (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):**

Pimpinan, sedikit Pimpinan, lupa tadi.

**KETUA RAPAT:**

Oh Pak Jhonni, silakan.

**F – P. DEMOKRAT (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):**

Saya langsung saja.

**KETUA RAPAT:**

Nanti setelah Pak Jhonni baru.

**F – P. DEMOKRAT (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):**

Dirjen Udara saja. Bandara F. Tobing supaya dituntaskan, berbarengan apa F. Tobing, ..., gitu saja, lupa saya, makasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Iya, terakhir Ibu Kapoksi silakan.

**F – PDIP (SRI RAHAYU):**

Makasih, Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,  
Kemudian dari Dirjen Perhubungan Laut maupun Udara,**

Saya satu hal saja, tadi sudah disinggung oleh Bu Eem, barangkali ada harus ada teknis ya Pak ya. Seperti daerah pemilihan saya ini memang ada laut tapi tidak ada, tidak ada apa namanya bandara, bukan bandara apa namanya? Pelabuhanannya, itu *ndak* punya. Daerah saya itu Kediri, Blitar, Tulungagung itu punya laut, punya di Prigi itu ada tapi untuk ikan, menangkap ikan jadi tidak ada hubungannya dengan ini.

Kemudian, udara juga demikian belum ada, mudah-mudahan Kediri kalau sudah selesai nanti ada. *Nah*, oleh karena itu mungkin yang dialami kawan-kawan itu tidak hanya saya saja, tetapi yang lain-lain juga demikian. Oleh karena itu, Bapak-Bapak sekalian, program yang padat karya ini saya juga tidak tahu di mana tempatnya begitu, di daerah saya. Ini kan ada di Tahun 2023 juga ada penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*. Artinya kan ini dalam rangka untuk padat karya kan sebenarnya, antara lain kan padat karya juga. Kemudian tenaga kerja yang 15.000 sekian yang Tahun 2022 ini baru terealisasi 4.277.

Maksud saya begini Pak secara teknis, dari, dari Dirjen ini minta data lah minta data dari kita. Misalkan nama ini ini Dapilnya mana, Kabupaten/Kota mana, sehingga Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Bapak dari Dirjen ini tahu bahwa oh ini tidak bisa program ini dilaksanakan di sana, di sana, lalu kira-kira apa yang bisa dilaksanakan, yang bisa dikomunikasikan dengan kita-kita Anggota dari Dapil yang ada.

Sehingga, tidak jadi penonton gitu kita ini tidak jadi penonton, karena *nggak* tahu juga, programnya udara ditaruh mana ya kalau mungkin Jawa Timur kan yang ada saja di Surabaya mungkin dekatnya Surabaya sekitarnya. Kemudian Malang, Malang pun juga apa, rumah saya Malang tapi Dapilnya bukan. Kemudian, kalau laut misalnya pelabuhannya mungkin Surabaya, yang lain kalau Jawa Timur Pantura saja, *nggak* ada yang lain ya mungkin kalau daerah-daerah saya *nggak* ada pelabuhan untuk ngangkut-ngangkut itu *nggak* ada selain ikan kalau pantai selatan itu.

*Nah*, oleh karena itu ini menjadi mungkin perlu dipertimbangkan diperhitungkan bagaimana supaya sama-sama di daerah pemilihan itu bisa

merekrut, merekrut tenaga kerja, yang memang dalam rangka untuk padat karya. Terima kasih, Pimpinan itu saja.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, masih ada lagi?

**F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

Pak Ketua, dari saya ada sedikit.

**KETUA RAPAT:**

Satu menit.

**F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

Iya, Pak Ketua, sedikit saja. Setelah kami ngikuti selama ini saya ada di Komisi V hampir 10 tahun. Saya lihat tidak ada sentuhan sama sekali terhadap kondisi hambatan kami hadapi di Papua, terutama terkait dengan bandara-bandara perintis, yang mungkin Aceh juga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya boleh usulkan bagaimana Dirjen Perhubungan Udara dengan BPSDM ya, lakukan kajian terkait dengan bagaimana ke depan kita mendorong menggunakan pesawat tanpa awak itu. Supaya daerah-daerah juga mengurangi resiko, karena di daerah-daerah kami memang sangat ekstrim, sehingga sering juga terjadi insiden.

Oleh karena itu, bagaimanaantisipasi situasi ini ke depan untuk memungkinkan adanya penggunaan pesawat tanpa awak, terutama untuk kepentingan distribusi logistik di daerah-daerah yang terpencil. Karena kita di sana untuk ngantar jatah beras maupun gaji, baik itu TNI, Polri atau guru atau tenaga medis yang ada di daerah-daerah baik di Kecamatan baik di Desa, baik di daerah-daerah terpencil itu semua pakai pesawat. Karena itu dengan cara ini mungkin akan lebih mempermudah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami harapkan mungkin perlu lakukan kajian secara mendalam supaya ke depan bisa dimanfaatkan, memanfaatkan apa kemajuan teknologi pesawat tanpa awak ini. Sekian, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya, sebelah kiri.

**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Pimpinan, mau cuma sampaikan usulan Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya, usulan saja ya.



**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Ya.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, dokumen ya? Iya silakan-silakan. Nanti yang lain semua yang mau kasih usulan silakan silakan kasih saja, supaya sekali jalan, ayo iya. Ayo, yang sudah kasih, besok *nggak* kasih lagi ya. Ingat ya, jangan minta *double-double*.

**F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Kakak Willem, Kakak Willem tidak ada?

**KETUA RAPAT:**

Ini melanggar ini, tidak boleh diskusi di situ. Baik, Pak Aras silakan. Aras sana, bukan, Pak Andi, bukan Pak Iwan, Pak Aras, sana Aras kan? Bukan Iwan kan? Iya betul. Yang ganteng sini, yang cakap di sana.

**F – PPP (Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):**

Terima kasih atas pengertiannya ananda Andi Iwan. Terima kasih Pimpinan.

*Bismilahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,  
Yang saya hormati Pimpinan dan kawan-kawan Anggota Komisi V,  
Yang saya hormati Pak Dirjen Udara dan Laut dan seluruh jajarannya,**

Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pasti bahwa hanya terkait dengan Dapil karena kami dari Sulawesi Selatan ada lima orang Pak, di Komisi V dan saya satu Dapil dengan Ananda Andi Iwan Aras. Ya tentu ini menjadi pekerjaan berat buat saya, karena nama sama, Dapil sama, kampung sama, ya dan dia sudah delapan tahun di Komisi V Pak, saya baru tiga tahun. Jadi, otomatis dia lebih dikenal dibanding saya, untuk bisa membedakan saya harus pelihara kumis dulu Pak.

Yang kedua, tentu aspirasi yang ada di daerah, kami pernah berkunjung di Kabupaten Pangkep. Yang, Pangkep ini pulaunya kurang lebih, lebih 100, yang berpenghuni kurang lebih 71 pulau Pak, di sana. Tentu fasilitas-fasilitas itu sangat dibutuhkan untuk melayani seluruh masyarakatnya. Apalagi perhubungan darat tidak terlalu maksimal di sana, karena perhubungan laut katanya yang lebih dominan untuk menangani seluruh permasalahan-permasalahan di terkait dengan transportasi laut di Kabupaten Pangkep. Oleh

karenanya mohon perhatian khusus di sana, baik berupa kapal motor yang bisa melayani antar pulau, maupun fasilitas pelabuhan yang harus dibenahi, Pak.

Yang kedua adalah juga di Kabupaten Bulukumba, Kajang ini kan pernah sempat tertunda dalam hal pembangunannya dan mohon untuk secepatnya supaya bisa mengejar target untuk tahun-tahun mendatang. Karena ini sudah tertunda kurang lebih hampir dua tahun, sehingga ini butuh percepatan untuk bisa memaksimalkan layanan-layanan yang ada di Kabupaten Bulukumba dan sekitarnya. Terutama daerah Selayar yang cukup dekat dengan sana.

Kemudian, yang berikutnya adalah ini terkait dengan layanan bandara, Angkasa Pura di Sultan Hassanudin, ini sangat semrawut Pak. Bayangkan kita VIP saja misalnya, itu tidak boleh kendaraan berhenti di dekat terminal, harus keluar. Oleh karenanya, tentu ini harus menjadi perhatian, sehingga bandara yang sebegitu mewah tapi aturan-aturan di dalamnya sangat semrawut. Sehingga, layanan Angkasa Pura kepada masyarakat tidak terlalu maksimal, dan bahkan pada puncak-puncak apa namanya, pemakaian bandara itu padatnya luar biasa. *Nah*, untukantisipasi tentu ini harus dibenahi, yang kedua adalah percepatan pembangunan terminal di Sultan Hasanuddin.

Yang kedua adalah pembangunan Arungpalaka di Kabupaten Bone. Ini juga menjadi perhatian supaya ini bisa lebih digenjot. Karena di dua tahun yang lalu kami pernah ke sana bersama dengan Pak Menteri dengan Pak Dirjen Udara yang sebelumnya, Pak Novi. Dan, itu sudah disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk segera dilaksanakan sehingga ya mohon ini diperlukan percepatan, sehingga di masa Pemerintahan Jokowi betul-betul perhubungan menjadi andalan dan menjadi penopang untuk pembangunan di negeri ini. Barangkali itu yang bisa disampaikan Pak Ketua, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, selanjutnya dari Anggota selesai. Kita ke unsur Pimpinan, Pak Ridwan silakan.

#### **F – P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Makasih, Pak Pimpinan rapat.

**Yang saya hormati teman-teman Komisi V,  
Kemudian Para Dirjen baik Darat maupun Udara beserta seluruh jajarannya,**

Mungkin saya di laut dulu Pak, laut dulu ya, laut, saya masuk ke Dapil saja Pak. Di daerah sana itu Pak, masih banyak suar Pak, ada beberapa suar itu yang tidak berfungsi. Kemudian perlu dibangun suar karena persoalan keselamatan di sana sangat penting Pak, suar sangat dibutuhkan di Sulawesi

Tenggara Pak, mungkin melalui apa namanya, melalui Kadisnav ya? Itu barangkali bisa ditanyakan juga tentang pentingnya ada di sana Pak.

Yang kedua ada pelabuhan Bungku Toko di sana Pak, pelabuhan utama itu yang ada di yang juga dikunjungi Pak Menteri baru-baru. Itu di sana itu panjangnya baru 180, sementara kapal-kapal yang bersandar ada 100 lebih ada yang di bawah 100 juga memang. *Nah*, utamanya penumpang, kalau pada saat apa namanya ada kapal barang di sana, saat ada kapal barang lalu kapal penumpang datang, itu mesti mereka mundur dulu Pak, mesti keluar dulu dia, baru kemudian masuk kapal penumpang lalu kemudian masuk lagi kalau sudah selesai kapal penumpangnya. Maksud saya mungkin bisa ditambah antara 50 sampai 100, paling sedikit 50, Pak. Sehingga betul-betul bisa sandar dua kapal, 50 meter lagi barangkali paling sedikit. Jadi, sehingga 230, *nah*, kalau sudah panjang 230 maka berarti sudah bisa dua kapal Pak, tidak lagi apa namanya saling tukar menukar kalau pada saat sementara membongkar muat dan itu kalau bongkar muat lebih mahal itu Pak, kalau pindah-pindah seperti itu.

Yang berikutnya Pak, di Munse Pak, Pelabuhan Munse. Pelabuhan Munse itu di apa namanya Kabupaten apa namanya Konaga Kepulauan letaknya. Itu dulu masih Pak Agus ya, Dirjennya itu, 5 tahun berturut-turut dianggarkan terus menerus itu Pak. *Nah*, baru-baru ini sudah dianggarkan lagi dengan anggaran Rp20 Miliar kalau saya tidak salah dan sudah ditender kalau saya tidak salah itu Pak. Maksud saya jangan sampai lupa lagi untuk penyelesaian Tahun 2023 ini Pak. Itu kira-kira Pak Dirjen, ya saya harapkan menjadi perhatian.

Kemudian kepada Pak Dirjen Udara, itu saya juga ingin bertanya itu persoalan tiket itu Pak. Tiket kita itu kan ada tarif bawah tarif atas Pak, tarif bawah dan tarif atas itu terlalu jauh saya lihat. Sebenarnya, kalau misalnya banyak apa, penerbangan kita di sini misalnya, itu barangkali bersaingnya bagus Pak, pasti akan ambil bawah mereka semuanya. Tapi kalau sedikit penerbangan kita Pak, melayani masyarakat kita, pastilah semua rata-rata akan ambil atas. Mungkin barangkali perlu menjadi perhatian juga ini Pak, jangan terlalu jauhnya jaraknya antara atas bawah dengan bawah itu Pak. Sehingga mereka tidak terlalu, kan kalau sudah bawah pasti sudah dihitung pasti sudah tidak rugi kalau di bawah Pak.

*Nah*, mereka semua karena kurangnya penerbangan kita, pesawat kita kurang, seperti yang kita baca di koran juga Erick Tohir memerintahkan bagaimana caranya Garuda itu agar diadakan penambahan pesawat misalnya, itu kan berarti gambaran bahwa kurang penerbangan kita, yang pada akhirnya para pengusaha-pengusaha penerbangan kita mengambil tarif atas yang termahal. *Nah*, oleh karena itu mungkin tarif atas bawah ini mesti dipertimbangkan kembali sehingga tidak terlalu jauh jaraknya Pak, itu Pak yang pertama.

Yang kedua, saya lihat di sini Pak, ada Bandara Sugi Manuru tidak masuk Pak, di sini, Sugi Manuru. Sugi Manuru di kampung saya Pak, kebetulan saya masih jadi Bupati dulu saya yang bangun ini Pak, iya masih Pak Cucu kalau saya tidak salah apa namanya Dirjen Perhubungan Udara, ini tolong

juga kalau bisa menjadi perhatian Pak, di situ. Saya lihat ada itu saluran di sana air sudah tergenang Pak, di sana, ada salurannya kemudian ada juga *landscape*-nya juga yang ada di sana, namanya Bandara Sugi Manuru, Pak.

Kemudian, juga ada di Bau-Bau Pak, di Bau-Bau itu juga itu ada apa namanya, bukit atau apa itu yang pas di Sulut itu, itu juga sangat menghambat itu Pak. Itu saja Pak Dirjen, ya, kedua Dirjen terima kasih, Pak Ketua terima kasih.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Ridwan, langsung ke Pak Andi Iwan.

**F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Makasih Pimpinan, ini resikonya se-Dapil dengan Pak Aras ini, tadi beliau bertanya hampir semua pertanyaannya, baik.

**Pimpinan, Anggota Komisi V yang saya hormati,  
Pak Dirjen Laut, Pak Dirjen Udara, beserta jajaran yang saya hormati,**

Saya ke Pak Dirjen Udara dulu, Pak. Ini *alhamdulillah* saya mengucapkan terima kasih karena usulan-usulan kami saya lihat sebagian besar terakomodir, di kolom terakomodir yang berkas Bapak kasih, pertanyaannya terakomodir dalam bentuk yang seperti apa Pak? Apakah usulan tersebut optimal pengalokasian anggarannya atau sekedar terakomodir dalam konteks yang seperti apa? Maksud saya jangan sampai terakomodir hanya sekedar masuk saja judulnya, tapi kegiatannya 1-2 Miliar sekedar mematikan usulan tetapi tidak menyelesaikan substansi yang diusulkan gitu oleh pihak bandaranya, Pak.

Tapi pada intinya saya mengucapkan terima kasih atas itu atas usulan-usulan kami. Walaupun, kemudian ada beberapa memang, ada dua, Kabupaten Bulukumba yang bandara pariwisata Pak. Dan, kemudian bandara perintis untuk Kabupaten Pangkep yang di daerah kepulauan-kepulauan. Itu tentunya memang masih dalam tahap studi, kami berharap tahun depan sudah bisa studinya berjalan, RIP apa DED dan lain sebagainya data-data dukungan yang dibutuhkan bisa berjalan sehingga 2024, tentu bisa masuk *action* ke pembangunan fisiknya. Karena ini juga, khususnya Kabupaten Pangkep ini sangat membutuhkan Pak, mereka betul, Kabupaten Pangkep ini di Sulawesi Selatan. Tapi kepulauan-kepuluannya itu lebih mendekati NTB ataupun Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, selatan, maaf, Kalimantan Selatan. Itu Pak Dirjen Udara.

Selanjutnya Pak Dirjen Laut Pak, ini usulan kami, saya lihat dari berkas yang Bapak berikan, data yang Bapak berikan. Hanya satu itu pun tadi mungkin Kabupaten Bulukumba yang disebutkan oleh Pak Aras. Kabupaten pelabuhan-

pelabuhan lainnya, kami dapatkan jawaban yang kurang lebih jawaban yang kami dapatkan ini sama seperti jawaban tahun lalu. Dan, usulan kami yang tahun lalu juga usulan yang sama dengan tahun ini, jawabannya pun tetap sama, Pak. Dibutuhkan RIP-RIP belum ditetapkan penyusunan DED, *dockling* ataupun semuanya sudah dipenuhi tapi keterbatasan anggaran.

Jadi, maksud saya kalau persoalan RIP-nya dari dua tahun lalu kami sampaikan *nggak* selesai-selesai sampai sekarang, masih tetap RIP-RIP terus Pak. Pertanyaannya kapan RIP-nya mau dikerjakan, kapan fisiknya bisa dilaksanakan. Sementara kegiatan ini, pelabuhan ini, banyak pelabuhan lama, pelabuhan-pelabuhan yang sudah Bapak kerjakan sebelumnya yang sudah terlalokasikan APBN. Tentu untuk pembangunan pelabuhan baru, pasti dilengkapi dengan data dukung yang sudah ada kan Pak Dirjen. Kalau misalkan nanti RIP-nya menjadi alasan, kadang-kadang juga pelabuhan yang dibangun ini belum selesai dengan desain awal. Desain awal masih banyak kegiatan yang belum terselesaikan misalkan, wilayah lapangan penumpukannya, wilayah-wilayah keperkantorannya dan lain sebagainya memang sudah dikerjakan. Tapi, *nggak* fungsional sampai sekarang, kalau alasannya *nggak* ada kapal, saya kira kalau pelabuhan itu *nggak* berfungsi bagaimana mau ada kapalnya juga Pak. Nah, kalau kemudian alasannya RIP lagi RIP lagi, pertanyaan saya kapan kira-kira RIP ini dilaksanakan? Apakah RIP harus dilaksanakan Komisi V atau gimana? Saya kira yang laksanakan tentu pihak Kemenhub sendiri RIP itu, iya kan? pertanyaannya apakah diusulkan atau tidak untuk dikerjakan RIP itu.

Sehingga kemudian Pak, jawaban ini tidak kami terima seperti ini lagi. Karena Tahun Anggaran yang lalu jawaban sama Pak, persis sama ini, usulan kami juga letaknya *nggak* berubah-berubah itu-itu saja pelabuhannya. Jadi, mohon Pak Dirjen coba Pak, seperti Palopo, Pak. Tahun lalu kami usulkan untuk tahun ini jawabannya RIP, belum selesai. Tapi dua tahun sebelumnya saya sudah dikerjakan juga APBN-nya, ada APBN-nya. Jadi, pertanyaannya RIP yang mana yang dicari? Kalau misalkan sudah dikerjakan dua tahun lalu, tahun ini *nggak* dikerjakan, tahun depan butuh RIP, jawabannya ini. Pelabuhan dermaga Palopo, RIP belum ditentukan, DED Tahun Anggaran 2016 oleh KSOP Bitung perlu (suara kurang jelas) DED, ini bukan KSOP Bitung Pak, ini KUPP Palopo, jadi jawaban yang Bapak kasih ini saya ini.

Apakah jawaban ini sekedar di *copy paste-copy paste* saja atau apa sehingga kemudian yang menjadi usulan *nggak* ada yang bisa masuk. Tambah lagi Pak, kami kunker spesifik kemarin ke Maluku Utara Pak Dirjen. Di situ masih ada pelabuhan-pelabuhan yang terdampak akibat gempa yang kemudian dijanjikan. Juga saya usulkan ke Bapak ini, fasilitas pelabuhan laut Pasi Palele, laut Gane, ini hasil kunker kami di sana kemarin. Maksud saya juga jangan sampai Pak, Pemerintah Kabupaten/Kota ataupun Provinsi merasa kami datang ini *nggak* ada guna sama sekali gitu, *nggak* ada penyelesaian di wilayah mereka nah mereka mau menyampaikan ini ke kita pada saat kunker. Mohon diperhatikan apa yang menjadi kesimpulan pada saat kunker itu, baik kunker reses maupun kunker spesifik seharusnya menjadi prioritas buat Bapak gituloh Pak. Agar supaya, kami betul-betul bisa ada manfaat bagi Pemerintah-

Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota yang menyampaikan aspirasinya pada saat kunker di daerah mereka.

Mungkin itu Pak Dirjen, mohon bantuan Pak Dirjen, coba dievaluasi ulang, Pak. Pelabuhan-pelabuhan ini semua pelabuhan lama, pelabuhan Belopa, Aurange, Bajoe. Bajoe bahkan ini Bajoe sudah dari dua tahun lalu saya usulkan, RIP terus Pak, jawabannya. Jadi, mohon Bapak periksa kembali, saya akan masukkan kembali usulan ini biar Bapak bisa *review* kembali jawaban-jawaban ini apa benar seperti itu semua. Kalau boleh Pak, ya tentu kalau memang RIP nya belum ada, Bapak cobalah RIP itu dikerjakan di tahun-tahun berikutnya Pak, supaya nggak menjadi alasan lagi setiap tahunnya. Baik, terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Iwan, Pak Andi Iwan Aras. Dengan demikian semua sudah selesai, tinggal saya, Ketua. Saya ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan yaitu menyangkut tentang Dapil kami, ada beberapa catatan di sini.

Yang pertama saya ingin ke Dirjen Perhubungan Udara. Tadi, Saudara saya Saudara Mesakh juga sudah sampaikan bahwa ada anggaran lanjutan untuk Bandara Subhan di Yahukimo. Saya kira bandara ini sudah sejak tahun berapa Pak? 2018 ya? 16-an begitu ya. Jadi, kalau dihitung-hitung ya sudah berapa tahun ini belum ya.

Ini menjadi catatan saya seperti apa yang tadi ditanyakan Saudara Wakil Ketua Pak Andi Iwan Aras. Bahwa jangan cuma masuk untuk menjawab slot kita bahwa ini ada gitu, tapi ada, apa adanya, ya ini yang perlu ya. Makanya harusnya kita masuk sampai ke satuan tiga, jadi kita tahu semua berapa besar ini yang ada. Agar betul-betul ya ini kita tahu kapan dia selesai, kapan dia layak gitu. Karena masih banyak yang perlu kita lanjutin, kalau tidak nanti kita cuma terbebani dengan satu landasan itu, kami mau *ngusulin* lagi jadi tidak enak karena sudah ada gitu.

*Nah*, ini yang membuat saya juga menjadi apa beban karena terus terang kemarin Pak Bupati dan jajaran itu ke sini minta bahwa kalau bisa, mereka membutuhkan lapangan terbang Hilariki, itu di distrik Ubalihi ya. Ini menjadi bagian dari rencana lapangan terbang alternatif di Kabupaten Yahukimo. Karena wilayah Yalimek, ini merupakan usulan baru yang mereka minta untuk bisa membuka akses di distrik yang ada di sana. Karena itu, beberapa kampung di sana itu terlalu sulit, karena jalan daratnya tidak mungkin, belum sampai sama sekali. Sedangkan, saya sampaikan ini Yahukimo sudah ada yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi, tolong Pak mungkin bisa direncanakan untuk berikutnya bisa bandara ini kita berikan kepada mereka di daerah. Karena memang mereka sangat membutuhkan daerah, landasan-landasan perintis untuk menjadi pintu masuk membuka terisolirnya masyarakat yang ada di sana.

Yang berikut, Pak Dirjen kami juga berterima kasih karena melihat subsidi Pemerintah untuk angkutan kargo khususnya di daerah kami, itu sudah dapat bisa memberikan ya, satu penurunan harga bahan baku makanan khususnya beras yang bisa masyarakat rasakan. Karena selama ini terus terang masyarakat sangat mengalami kesulitan dan berat sekali untuk angkutan kargo dan penumpang. Karena subsidi bukan cuma kargo tapi penumpang juga, terima kasih banyak pada Pemerintah. Ini satu perhatian yang sangat kami hargai.

Yang berikut, saya kira saya sudah sampaikan tentang bandara perintis yang ada di Kepulauan Yapen, ya, di Bandara Silas Papareh. Itu ya mungkin ada revitalisasi karena aspalnya semua sudah terkelupas, kalau saya pulang kampung, itu kampung saya tuh. Itu aduh saya takut benar pesawatnya kayak mau meledak kalau turun itu. Jadi, tolong Pak, jangan sampai nanti terjadi musibah baru kita hadir di sana, ya.

Yang berikut, karena ini menyangkut juga daerah yang sangat kami banggakan di Papua yaitu tentang daerah wisata yang begitu terkenal di Raja Ampat. Saya kira ini perlu kita dukung untuk bagaimana fasilitas-fasilitas bandara, agar pintu wisata ini bisa aksesnya dapat dengan mudah masyarakat dari luar masuk ke tempat wisata di daerah sana. Bukan cuma untuk udara tapi laut juga, ya. Ini perlu saya sampaikan karena kami sangat, saya terutama bangga dengan bagaimana alam keindahan yang ada di Raja Ampat. Semua orang yang datang ke sana selalu menyampaikan ini surga di laut, begitu indah. Ada teman kemarin, dari Amerika itu datang langsung ke Raja Ampat, balik dia bilang tiada duanya katanya ya. Kami bangga cuma masalahnya ke sananya itu ya kan, agak susah dan biayanya sangat besar. *Nah*, ini mungkin bisa ada subsidi untuk penerbangan juga, supaya wisatanya bisa lebih banyak ke sana. Maka ekonomi masyarakat di sana akan lebih baik, ini yang kita harapkan ya kehadiran Pemerintah bisa ada di sana.

Ini bukan cuma udara tapi laut juga, mumpung Pak Dirjen Laut supaya perhatikan untuk pelabuhan di sana, fasilitas-fasilitas kapal-kapal yang bisa mampir ke sana itu mendapat fasilitas yang baik. Karena mereka sampaikan bahwa yang menikmati hasil itu kebanyakan dari Kabupaten Sorong. Itu sudah diambil di sana syahbandarnya semuanya, sedangkan mereka nggak dapat apa-apa gitu. *Nah*, ini, ini, yang perlu, karena saya dikomplain sama Bupati Raja Ampat dan jajaran. Jadi, ini saya ingin sampaikan agar jadi perhatian ya kita.

Yang berikut, saya ingin tanya Pak Dirjen Laut nih, Dirjen Udara sudah. Kemarin ada satu pelabuhan itu mungkin pelabuhan perintis ya apa ini darat apa laut ya di Pepera, itu dekat Asmat, pintu masuk untuk nanti ke pegunungan tengah. Saya punya gambar kemarin katanya sudah selesai ini dari Perhubungan yang buat, jalannya belum ada memang. Jalan belum ada yang menghubungkan itu sebenarnya manfaatnya untuk Kabupaten Yahukimo, cuma areanya ada di Asmat, gitu ya. Asmat tidak punya kepentingan sebenarnya untuk itu. Karena itu yang punya kepentingan adalah di Yahukimo, dari Yahukimo sudah buat jalan sampai ke sungai A, itu tinggal sungai itu jembatan, terus jalan penghubung dari jembatan itu ke pelabuhan.

Kemarin saya sudah minta untuk PUPR untuk masuk untuk jalan dan jembatan. Saya terima kasih ada jembatan itu, ya dan ini menjadi pemicu untuk kewajiban untuk PUPR untuk bisa segera buat jalan itu. Karena pelabuhan ini sudah ada dan dia tidak tergantung dengan pasang surut laut, jadi kapal dengan kelas ton besar juga bisa masuk ke sana ya. Ini akan membantu sekali untuk kemahalan yang akan dialami oleh teman-teman di daerah sana Yahukimo dan itu bisa efeknya terus ke atas. Karena dari Yahukimo kita akan coba buat jalan lagi tembus ke Wamena karena dari Wamena sudah Lanijaya, Tolikara semua sudah bisa jalan darat. Jadi, ini sangat penting urat nadi perhubungan kita yang nanti kita buka di daerah tengah. Jadi, terima kasih untuk itu semua.

Yang berikut saya, ada catatan penting tadi disampaikan oleh teman-teman, ini saya ingatkan ke Pak Dirjen berdua. Yaitu tentang padat karya, banyak kami juga tidak pernah dan saya belum pernah dihubungi untuk melakukan bersama mitra di Dirjen Laut dan Udara di Dapil kami untuk padat karya, ya. Saya kira banyak kami belum, ada di daerah kami yang memang tidak ada. Tapi, kalau bicara udara kami punya semua bandara, bicara perhubungan laut kami punya juga pelabuhan-pelabuhan.

Mungkin kami, saya kira alangkah baiknya, supaya tidak kehadiran kita tapi laporan ke kita, bahwa Bapak sudah lakukan itu dengan data-data foto dan sebagainya, bahwa itu adalah program aspirasi Anggota DPR RI Komisi V. Jadi, Dapil siapa foto pasang balihonya, supaya terpancang di sana baliho bahwa ini mitra kami, inilah adalah hasil aspirasi yang diberikan oleh Anggota ya. Saya kira itu yang betul dilakukan, supaya nanti kami rapat Bapak tolong berikan ke kami laporkan, bahwa padat karya yang sudah kami lakukan di Dirjen Laut, di sini, Dapil Ibu ini, Dapil Bapak ini, ada gambarnya kami lihat semua berikan ke kami semuanya ya.

Yang berikut saya juga sepakat ini menjadi catatan penting untuk kita. Selalu ya kalau kita bicara kecelakaan ya kan, musibah pesawat atau orang apa hilang di laut dan sebagainya tenggelam selalu kita minta Basarnas. Tapi mereka juga komplain kepada kita karena itu, mereka tidak punya *space* untuk kapal mereka, kadang-kadang yang tadi Ibu ini sampaikan, harus digeser harus di apa, kalau bisa ini kan Pemerintah sama-sama. Dan, itu sangat dibutuhkan, kalau ada terjadinya kecelakaan kapal apa-apa pasti minta tolongnya ke Basarnas, ya kan, koordinasinya ke sana, ya kan. Maka dia harus diberikan tempat di sana, ya kan, saya kira di bandara juga kan selalu mereka punya tempat heli, ya kan diberikan untuk itu. Jadi saya kira ini perlu sekali, harus sama-sama kita, kerja sama ini perlu. Karena ini untuk apa untuk melayani masyarakat kalau terjadi kecelakaan dan sebagainya.

Saya juga memberikan catatan penting tentang evaluasi untuk program-program tentang ada pembangunan bandara. Karena kita lihat bandara-bandara kita yang ada yang kita buat begitu mewah ternyata tidak seperti kita harapkan untuk bisa dimanfaatkan dengan baik. Menjadi beban, saya kira itu jadi beban untuk setiap tahun ada anggaran untuk pemeliharaan, sedangkan PNBPNya tidak ada sama sekali. Alangkah baiknya kalau itu diberikan ke,



bangun bandara-bandara perintis yang memang masyarakat masih memerlukan itu ya kan ini perlu, ya. Jadi, hal-hal ini yang memang saya ingin juga bisa di menjadi perhatian mitra kita untuk setiap kali perencanaan itu jangan kita cuma mau merencanakan tetapi manfaatnya, manfaatnya ke depan seperti apa yang perlu kita sama-sama.

Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, terima kasih untuk perhatiannya. Demikian

**F – PDIP (Dra. SRI RAHAYU):**

Izin, sedikit Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Oh.

**F – PDIP (Dra. SRI RAHAYU):**

Sebelum.

**KETUA RAPAT:**

Masih ada iya, silakan Bu.

**F – PDIP (Dra. SRI RAHAYU):**

Saya hanya memberikan penguatan saja terhadap apa yang saya sampaikan. Bahwa anggaran ini kan seperti punyanya udara ini kan, ada 113.000 padat karya dengan anggarannya nggak kelihatan di sini. Kemudian, kebetulan di Jawa Timur ini sama sekali *nggak* ada, program itu sama sekali nggak ada, saya cek satu-satu nggak ada. Kemudian kalau yang laut, itu di Provinsi Jawa Timur ada 4,748 Tahun 2023 Pak, saya *nggak* lihat 2022 karena sudah lewat.

Maksud saya Pak Pimpinan, supaya kita ini juga *nggak* berharap-harap. Kira-kira bisa *nggak* untuk wilayah-wilayah yang seperti tadi Bapak sampaikan, kita misalnya nggak punya bandar udara, tapi ada program itu. Demikian juga *nggak* punya laut, Bu Estu ini, Jombang *nggak* punya laut, *nggak* punya udara.

*Nah*, ini gimana gitu, saya hanya ingin jawabannya saja bisa apa *nggak* gitu saja. Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya baik, saya kira demikian pendapat dan pertanyaan yang telah disampaikan oleh Anggota dan Pimpinan DPR RI khususnya Komisi V. Selanjutnya, kami persilakan kepada Dirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perhubungan Laut untuk memberikan tanggapan. Tapi, saya ingin kalau bisa

jam 3 kita selesai ya, jadi jawaban yang penting saja Pak Dirjen. Nanti yang lain bisa berikan secara tertulis, silakan.

**Pit. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Ir. NUR ISNIN ISTIARTONO, M.Si.):**

Terima kasih.

**Pak Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Jadi, pada secara prinsip kami telah mencatat semuanya dan mencermati, dan nanti secara detail akan kami jawab tertulis Bapak-Ibu. Namun ada beberapa hal harus kami sampaikan, terutama masalah yang terkait dengan masalah komunikasi, itu akan kami coba ikuti arahan daripada Pimpinan. Karena memang tidak semua di udara, misalnya juga ada beberapa yang kosong, di Jawa Timur Bu, itu ada yang kosong memang kebanyakan adalah Angkasa Pura dan Pemda, walaupun ada bandara tapi Angkasa Pura. Dan, mungkin juga tadi ada juga yang di (suara kurang jelas) tidak mempunyai di mana, kita sudah akan rangkum di dalam satu Kemenhub untuk kita komunikasikan.

Kemudian, terkait dengan infrastruktur yang mungkin ada yang perlu pendetailan, kami ada detailnya Pak, mungkin nanti di komunikasi akan terlihat lebih lanjut lagi.

Kemudian untuk yang terkait dengan masukan *safety security* sama pelayanan, *Insyah Allah* kami selalu konsen terhadap itu. Dan, masukkan Bapak-Ibu sekalian menjadi masukkan yang berharga bagi kami untuk meningkatkan terutama di bidang pengawasan, keselamatan, dan keamanan maupun daripada pelayanan. Tadi misalnya ada beberapa usulan atau masukan yang terkait dengan masalah infrastruktur, itu memang ada beberapa yang perlu kami dalam seperti tadi ada Buntu Kunik misalnya. Memang konsentrasi kami ada di *obstacle*, landasan sudah, memang landasannya tidak bisa dipakai semuanya karena ada *obstacle*. Apabila *obstacle*-nya sudah diturunkan, maka *Insyah Allah* landasannya sudah bisa dipakai lebih maksimal lagi keseluruhannya. Beberapa yang disampaikan kami akan catat, termasuk yang DAK tadi memang untuk udara sebagian besar Pemda memang tidak mempunyai urusan di bidang itu namun kami berikan masukkan terkait dengan kebutuhan harmonisasi apa yang (suara kurang jelas) Pemda dari sisi UU yaitu utilitas, aksesibilitas pada bandara sehingga bisa saling harmonis kolaborasi antara Pemda dengan kami di dalam bagaimana mendukung bandar udara dalam pelayanannya.

Saya kira nanti secara garis besar akan kami tertulis apabila diperkenankan. Jadi, secara tuntas sudah kami sampaikan, untuk yang tadi perintis mungkin tadi di Papua. Itu salah satunya adalah kami juga sedang proses pengadaan Bapak, untuk memasang *wind sock* di berbagai macam lokasi bandara sebagai bagian daripada *safety*. Walaupun itu adalah bandara

dikelola oleh distrik, namun kami sedang mengadakan *wind sock* sebagai salah satu fasilitas untuk keselamatan penerbangan.

Jadi, kami pasang di akhir tahun ini kami sudah alokasikan dan sudah kontrak untuk sekitar 80 *wind sock* dan datang bertahap. Karena mungkin di Kaltara juga perlu, yang tadi disampaikan sebagaimana tadi, Pak Iwan terkait dengan masalah yang seperti di seperti di Ijoh, seperti di mana tadi lupa, (suara kurang jelas) itu, itu akan kami kami juga komunikasikan dengan Pemda untuk itu. Jadi, kami ada beberapa yang kami komunikasikan Pemda lagi untuk mendetailkan percepatan dan mudah-mudahan kami bisa mengakomodir secara maksimal daripada masukkan dan saran daripada Bapak-Ibu Anggota Dewan Komisi V yang kami hormati, Saya kira demikian Bapak-Ibu, perkenankan.

**KETUA RAPAT:**

Lanjut, Pak Dirjen Laut.

**DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Ir. ARIF TOHA TJAHAJAGAMA, DEA.):**

Baik, terima kasih.

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi V DPR RI,  
Bapak-Ibu Anggota Komisi V DPR RI yang mulia serta para hadirin  
sekalian,**

Kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, masukan, dan evaluasi serta koreksi dari apa yang kami lakukan terkait dengan fungsi kami penyelenggaraan transportasi laut baik untuk penumpang maupun barang serta konektivitas.

Beberapa pertanyaan dan masukan akan kami berikan tanggapan secara lengkap melalui tertulis, tapi secara ringkas dapat kami sampaikan pertama terkait dengan dari Bapak Pimpinan terkait dengan Raja Ampat perlu kami sampaikan Pak, bahwa kami dari transportasi laut terus mengupayakan perbaikan di Raja Ampat, di antaranya kami telah menetapkan alur pelayaran di Raja Ampat sehingga tidak lagi terjadi kapal yang kandas dan merusak terumbu karang Pak. Jadi, ini sudah mulai di Sorong sampai Raja Ampat sudah ditetapkan, kemudian dari arah kepulauan juga sudah kita proses penetapannya. Sehingga, tidak lagi terjadi perusakan terumbu karang karena kapal melintas tidak di alurnya.

Terkait dengan pelabuhan nanti akan kami cek Pak, seingat kami di pelabuhan tersebut mungkin aset yang dari Perhubungan Darat karena pelabuhan-pelabuhan sungai, kami di Asmat lebih ada (suara kurang jelas) setahu saya Pak, yang jadi Perhubungan Laut.

Berikutnya dari Pak Andi Iwan, kami terima kasih atas koreksinya Pak. Jadi, akan kami cermati lebih jauh terkait dengan kelengkapan-kelengkapan

dokumen ini, apabila memang masih berulang akan kami coba prioritaskan untuk penyelesaian RIP, karena RIP ini juga terkait dengan Pemerintah Daerah Pak, rekomendasi kemudian data dan sebagainya akan kami dalami. Beberapa lokasi seperti Palopo, Bolepa dan Awerange dan Bajo ini akan kami tuntaskan sehingga bisa dianggarkan untuk pelaksanaannya. Terkait dengan Kajang akan kami selesaikan tahun depan Pak, ada di Anggaran 2023. Memang kemarin ada perubahan dan akan disesuaikan dokumennya. Jadi, mudah-mudahan dokumennya tahun ini selesai dan tahun depan sudah dianggarkan untuk penyelesaiannya.

Kemudian, dari Pak Ridwan Bae terkait rambu suar beberapa sudah kami anggarakan. Kemudian Bungkutoko, ya, ini memang rencananya akan dilakukan KSP dengan Pelindo, Pak. Sehingga nanti akan kami lihat manifestasi dari Pelindo untuk penambahan dermaga sesuai dengan kebutuhan sehingga kegiatan logistik bisa lebih cepat. Untuk Munse sudah kami anggarakan hingga penyelesaian Tahun 2023 jadi tetap ada Pak.

Dari Bapak-Ibu Anggota yang menyampaikan beberapa pertanyaan dan masukkan dari Bu Sadarestuwati sesuai dengan juga dari Pak Pimpinan tadi terkait dengan dermaga kapal negara untuk Basarnas. Jadi, memang ini di beberapa pelabuhan kami memiliki dermaga kapal negara Pak, di sana ada dermaga untuk kapal KPLP, dermaga untuk polo air dan sebagainya. Di Surabaya, kami sedang membangun untuk pangkalan KPLP, tentunya ini juga bisa digunakan bersama kapal negara yang lainnya termasuk Basarnas. Di dermaga navigasi juga ada beberapa lokasi yang kami selalu bekerja sama dengan kapal-kapal negara lainnya. Sehingga terus kami lakukan kolaborasi untuk pengoperasian kapal-kapal untuk terutama pada saat terjadinya musibah yang memerlukan pencarian dan pertolongan.

Untuk Pak Irwan untuk Kalimantan Timur, beberapa memang sudah kami anggarakan Pak, termasuk untuk yang Sangkulirang, yang ada itu adalah untuk pembangunan gudang Pak. Nanti kami coba evaluasi lagi apakah proporsi dari anggaran yang untuk Kalimantan Timur ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Tetapi sebagian besar memang pada upaya untuk penyelesaiannya Pak. Seperti tadi pembangunan penanggulangan pencemaran sudah dianggarkan. Kemudian juga terkait dengan rambu suar dan DED-nya nanti akan kami coba evaluasi apakah bisa setelah DED selesai kemudian dilakukan pengadaan rambunya.

Untuk Ibu Cen Sui Lan, untuk Anambas, kami sudah menganggarkan untuk pengadaan vendor dan lampu pelabuhan laut. Dan, juga untuk di Pulau Laut, di Serasan dan di Subi masing-masing Rp1 Miliar, Rp1,2 Miliar dan Rp3,6 Miliar.

Untuk DAK, kami sampaikan dari Pak Hamka bahwa evaluasi yang kami lakukan terhadap DAK ini, terhadap beberapa hal di antaranya. Apakah pelabuhan yang diusulkan ini sudah tercantum di dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Kemudian, apakah status aset pelabuhan yang dimiliki oleh Pemda tersebut sudah menjadi aset daripada Pemerintah Daerah. Dan,

juga apakah sudah memiliki izin operasional dan apakah sudah memiliki dokumen-dokumen perencanaan, sehingga bisa dilakukan pembangunannya.

Juga, kami memerlukan evaluasi terhadap operasional pelabuhan baik penumpang maupun barang sehingga bisa ditentukan urgensi maupun kelayakan daripada pembangunan dengan melalui skema DAK. Juga ada kinerja pelaksanaan fisik dan penyerapan anggaran dari khusus untuk Pemda penerima DAK pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Ini beberapa yang perlu kami lakukan evaluasi terhadap usulan DAK yang kami koordinasikan dengan Bappenas, Pak.

Itu beberapa hal yang mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Untuk yang pertanyaan selain tersebut akan kami sampaikan melalui jawaban tertulis. Demikian, yang dapat kami sampaikan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, demikianlah Saudara-Saudara. Apabila tidak ada hal-hal lagi yang perlu kita bahas. Maka, sesuai dengan ketentuan tata tertib Pasal 283, kita akan merumuskan kesimpulan atau keputusan rapat dengar pendapat pada hari ini untuk kita sepakati dan kita tanda tangani bersama.

Baik, langsung.

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, M.S.):**

Pak Dirjen, tolong matiin, ya.

**KETUA RAPAT:**

Baik. Kita langsung ya.

Draf Kesimpulan RDP Komisi V DPR RI Dengan Dirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Kamis, 1 September 2022.

1. Komisi V DPR RI meminta Dirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan capaian serapan APBN Tahun Anggaran 2022 sesuai saran dan masukkan Komisi V DPR RI. Di mana capaian per bulan Agustus 2022 sebagai berikut:
  - a. Unit organisasi Dirjen Perhubungan Udara: Realisasi keuangan 54,95%. Realisasi fisik 56,10%.
  - b. Dirjen Perhubungan Laut: Realisasi keuangan 54,06%. Realisasi fisik 55,15%. Lanjut.
2. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Dirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Masing-Masing Unit Organisasi Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- Unit organisasi yang pertama Dirjen Perhubungan Udara. Pagu kebutuhan Tahun Anggaran 2023:
    - a. Sebesar Rp19 Miliar, eh, Rp19 Triliun, iya ya? Rp19 Triliun, ya? Rp19.917.487.620.000. Nota keuangan APBN Tahun Anggaran 2023, Rp7.178.218.324.000. Selisih antara A dan B Rp12.739.269.296.000.
  - Unit organisasi kedua Dirjen Perhubungan Laut. Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2023:
    - a. Rp13.418.469.415.000. Nota keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023 yaitu, b. Rp8.799.307.413.000. Selisih a dan b Rp4.619.167.002.000.
3. Komisi V DPR RI bersama Dirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sepakat bahwa program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 diprioritaskan antara lain dari hasil kunjungan kerja dan masukkan serta usulan Komisi V DPR RI, lanjut.

Selesai tiga, cukup? Anggota? Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**

Mitra? Setuju.

**(RAPAT: SETUJU)**

**Saudara-Saudara yang kami hormati,**

Dengan telah disepakati beberapa kesimpulan dan keputusan tersebut. Maka rangkaian acara RDP pada hari ini telah kita selesaikan.

Kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan. Sebelum rangkaian acara rapat ini kami tutup, kami berikan kesempatan kepada salah satu Dirjen Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan sambutan penutup, silakan Pak Dirjen.

**Plt. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Ir. NUR ISNIN ISTIARTONO, M.Si.):**

**Yang terhormat Pimpinan Komisi V DPR RI,  
Yang terhormat Bapak-Ibu Anggota Komisi V DPR RI,**

Kami selaku mitra kerja dari Pemerintah, dari Dirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perhubungan Laut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan saran masukkan serta koreksi dari apa yang kami upayakan untuk pelaksanaan kegiatan di Tahun 2022 ini maupun di Tahun 2023 ini, nanti. Jadi, kami akan terus melakukan koordinasi terkait dengan program-program strategis baik mengenai padat karya dan juga kegiatan-kegiatan operasional pelayanan pada masyarakat. Sehingga yang menjadi masukkan dan harapan kita semua untuk memberikan pelayanan terbaik pada

masyarakat khususnya di jasa perhubungan udara maupun perhubungan laut, dapat semakin hari semakin baik. Terima kasih sekali lagi,

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu kita bicarakan. Maka rapat dengar pendapat pada hari ini dapat kita tutup dengan ucapan terima kasih,

*Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.00 WIB)**

**JAKARTA, 1 September 2022**

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

**NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.**  
**NIP. 196912021998032002**